ISSN 2460-1683

Masyarakat ASEAN

Edisi 10 / DESEMBER 2015

MAJU BERSAMA MASYARAKAT ASEAN

"ASEAN adalah kita"

MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

DAFTAR ISI

Foto Cover: AP

Perspektif
ASEAN 2025 Kewaspadaan, Determinasi, dan Optimisme **4**

Laporan Utama
Menuju Masyarakat Sosial Budaya ASEAN **12**
Dimensi Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN **13**

Laporan Khusus
Isu Asap Lintas Batas Jadi Perhatian Pimpinan ASEAN **15**
Indonesia Gagas Standar PR di ASEAN **18**
Indonesia Berbagi Pengalaman tentang SAR **20**
Mitra Wicara Dukung Pembentukan Masyarakat ASEAN **24**
Wujud Diplomasi Maritim RI **27**

Reportase
Kebijakan Perdagangan Kamboja **28**
Kiat Negara ASEAN Menyongsong Masyarakat ASEAN **31**

Galeri
ASEAN Friendship Ghatering **33**

Serba Serbi
40 Tahun Kerja Sama Perempuan di ASEAN **42**

Pojok Sosialisasi
UNIPDU, Pesantren Pertama Miliki PSA **46**

Profil
Prita Kemal Gani, Gagas Organisasi PR ASEAN **50**

Apa Kata Mereka **52**

LAPORAN UTAMA 6

STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN DI KAWASAN ASEAN: '*CONDITIO SINE QUA NON*' BAGI MASYARAKAT ASEAN

Salah satu kontribusi nyata ASEAN bagi kawasan dan dunia adalah perannya dalam menciptakan serta menjaga keamanan dan stabilitas. Dengan adanya keamanan dan stabilitas tersebut, seluruh negara anggota ASEAN dapat fokus pada pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Bentuk kerja sama Politik dan Keamanan ASEAN dalam pilar Polkam Masyarakat ASEAN 2015 terus diperjuangkan agar sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

MALAYSIAN INSIDER

LAPORAN UTAMA 9

MEA DAN DINAMIKA EKONOMI TIONGKOK, INDIA DAN DUNIA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diimplementasikan pada 31 Desember 2015 dalam prosesnya memiliki jalan berliku yang cukup panjang. Dinamika perekonomian dunia selalu berubah, tetapi ASEAN selalu merespon dengan sebuah upaya kolektif yang mampu mempertahankan ASEAN sebagai kawasan tujuan utama bagi investor di dunia.

YOURPNOMPENH.COM

Masyarakat
ASEAN

BUSINESSTIMES.COM.SG

LAPORAN KHUSUS 16
RENCANA AKSI PILAR POLKAM TUNTAS TEREALISASI

Per tanggal 20 November 2015 seluruh langkah aksi *APSC Blueprint* yaitu sebanyak 146 langkah aksi, telah terlaksana. Sejumlah langkah aksi bersifat berkelanjutan sehingga ASEAN memasukkannya ke dalam *APSC Blueprint 2025* untuk diimplementasikan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

LAPORAN KHUSUS 22
EAS STATEMENT ON ENHANCING REGIONAL MARITIME COOPERATION

Sebuah prakarsa Indonesia, yaitu *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* berhasil disahkan dalam KTT ke-10 *East Asia Summit* (EAS). Bukti nyata kepemimpinan dan peran aktif Indonesia di kawasan.

STRAITSTIMES.COM

REPORTASE 36
40 TAHUN KERJA SAMA KEMITRAAN ASEAN-SELANDIA BARU

KEMLU.GO.ID

SERBA SERBI 40
TIPS BISNIS DI THAILAND

Salah satu target pasar prospektif yang menjadi bidikan para pengusaha untuk melebarkan bisnis mereka di era MEA adalah Thailand. Namun, untuk bisa memulai bisnis di Thailand tidak semudah membalik telapak tangan.

LUXTRAV.COM

POJOK SOSIALISASI 48
BANDUNG PUNYA DUA PUSAT STUDI ASEAN

WISATA 51
POTENSI WISATA NUSANTARA MENGHADAPI MEA

Bagi Anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui e-mail: buletinkomunitasasean@kemlu.go.id

Penanggung Jawab:
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
I Gusti Agung Wesaka Puja

Penasehat
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kerja Sama ASEAN
Iwan Suyudhie Amri

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi
Andi Dirgahayu Yudyachandra

Dewan Redaksi
Kusnaredi Takarijanto
Braviono Arief Adilaksono
Didik Trimardjono
Annie Yuliyanti

Redaktur Pelaksana
Andi Dirgahayu Yudyachandra

Staf Redaksi
Ahimsa Sukartono, Endang Susilowati, Susilo, Sylvia Masri, Rizky Anugerah Putra, Mohamad Rizali Noor, I Made Diangga Adika Karang, Wiweka Sukma Wardhani, Nur Rochma Amaliah, Rina F. Wahyuningsih, Fajar Arianto, Rahma Juwita

Pemelihara Situs Web
Puri Wulandari
Mizana Khusnu Perdani

Administrasi
Avi Dewani Sari Harahap, Didi Suparyadi, Priya Novian, TB. M. Ramadhan
Indyah Kusumawati

Distribusi
Mulyanto, Kasirun
Tuwuh Ismail

Alamat Redaksi:
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat,
Telp. 021-3509050/021-3509059,
Fax. 021-3509050

ASEAN 2025:
KEWASPADAAN, DETERMINASI, DAN OPTIMISME

I GUSTI AGUNG WESAKA PUJA
Direktur Jenderal
Kerja Sama ASEAN

KEMLU.GO.ID

Sepanjang tahun 2015 Majalah "Masyarakat ASEAN" telah mengupas berbagai diskursus publik mengenai Masyarakat ASEAN. Di antaranya; peran ASEAN dalam mendukung pembangunan nasional dengan menjaga stabilitas kawasan; kesiapan daerah dalam menyambut MEA; dan bagaimana mengoptimalkan manfaat serta peluang MEA bagi publik Indonesia.

Namun, masih tersisa satu pertanyaan di benak masyarakat; Ada apa setelah 31 Desember 2015? Apakah ASEAN akan menjadi satu entitas politik seperti Uni Eropa? Bagaimana dengan nasib produsen lokal kalau pasar dibanjiri oleh produk negara tetangga? Mengapa tenaga kerja asing sepertinya bebas masuk ke Indonesia, bagaimana dengan tenaga kerja kita? Berbagai pertanyaan tersebut memang terkesan wajar dan mendasar.

Perlu dipahami bahwa dimulainya pemberlakuan Masyarakat ASEAN pada tanggal 31 Desember 2015 bukanlah akhir atau garis finis. Apabila ditilik secara lebih seksama, Masyarakat ASEAN merupakan proses yang telah, sedang, dan akan terus berlangsung. Tujuan para Pemimpin negara anggota ASEAN membentuk Masyarakat ASEAN adalah untuk menciptakan masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur serta saling peduli. Secara lebih luas, Masyarakat ASEAN dibentuk guna mempererat kesatuan ASEAN dalam menghadapi konstelasi global. Faktor-faktor dinamis tersebut menegaskan bahwa Masyarakat ASEAN adalah proses bukan akhir dari sebuah *event*.

Kiprah dan peran ASEAN di kawasan bahkan dunia memiliki sejarah yang panjang. Tidak mungkin untuk menafikan peran ASEAN, khususnya Indonesia, selama 48 tahun ke belakang terutama dalam menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil. Lebih dari empat dasawarsa dunia menyaksikan kawasan Asia Tenggara yang relatif bebas dari konflik bersenjata antar negara serta pesatnya pembangunan ekonomi di kawasan. Proses pembentukan MEA telah jauh dimulai sejak tahun 1970-an. ASEAN menyadari bahwa dinamika perekonomian dunia yang terus berubah menuntut respon dan upaya kolektif guna mempertahankan ASEAN sebagai kawasan yang menarik secara ekonomi dan menjadi tujuan utama investasi serta bisnis dunia.

Bahkan sejak pembentukannya ASEAN telah memfokuskan pada isu sosial budaya. Program promosi kesenian dan beasiswa bagi pelajar serta mahasiswa adalah jamak dilaksanakan sejak awal terbentuknya ASEAN. Para Pemimpin ASEAN menyadari bahwa kesan ASEAN yang elitis perlu dihilangkan demi kesuksesan integrasi Masyarakat ASEAN. Penguatan dan penekanan pada pentingnya asas manfaat dalam setiap *outcomes* kerja sama ASEAN diharapkan terus mendukung terciptanya ASEAN yang berpusat dan berorientasi pada masyarakat.

Perjalanan panjang ASEAN juga bersenyawa dengan dinamika relasi dan kepentingan kekuatan besar dunia. Berbagai kekuatan besar dunia memandang penting ASEAN untuk memperluas pengaruhnya di Asia Pasifik. Hal tersebut sejalan dengan semakin meningkatnya nilai strategis kawasan Asia Pasifik dewasa ini. Sebut saja Amerika Serikat, Rusia (dahulu Uni Soviet), dan belakangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta India yang muncul sebagai kekuatan baru. Meningkatnya postur ASEAN selain karena dinamika politik-keamanan, juga karena nilai strategisnya secara ekonomi. Banyak pengamat menilai ASEAN adalah satu-satunya basis produksi dan pasar yang mampu mengimbangi RRT di Asia Pasifik. Selain itu, keberhasilan ASEAN dalam menjaga kemajuan proses demokratisasi di Myanmar, mencegah eskalasi konflik di Filipina Selatan, perbatasan Thailand – Kamboja, dan kawasan Laut China Selatan (LCS) sulit untuk dipandang sebelah mata oleh dunia internasional.

Lalu, kembali ke pertanyaan semula; ada apa setelah 31 Desember 2015? Apakah akan ada perubahan dan perbedaan besar setelah 2015? Menyimak penjelasan di atas, tidak akan ada suatu *event* yang signifikan dan dapat merubah kehidupan masyarakat Indonesia secara tiba-tiba. Lantas, bagaimana masyarakat harus menyikapinya? Tiga kata kunci; waspada, determinasi, dan optimis.

Masyarakat ASEAN akan membawa berbagai macam peluang bagi seluruh elemen, baik untuk kalangan pemerintah, swasta, dan

juga publik pada umumnya. Di sisi lain, tidak dapat kita pungkiri Masyarakat ASEAN juga membawa beribu tantangan. Apabila tidak awas, bukanlah mustahil kita hanya akan menilai tantangan sebagai ancaman yang hanya membawa dampak negatif bagi Masyarakat ASEAN dibandingkan dengan peluangnya. Oleh karenanya, kewaspadaan dan kesiapan merupakan unsur yang mutlak. Waspada terhadap berbagai potensi tantangan yang timbul. Tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi seperti pergerakan tenaga kerja profesional yang sudah sering dibicarakan. Namun juga waspada terhadap pengaruh sejumlah negara besar yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan. Salah satu contoh paling nyata belakangan ini adalah isu LCS. Masyarakat ASEAN (dalam arti sebenarnya – pemerintah, swasta, rakyat, dan media) harus memiliki kewaspadaan dalam membaca berbagai tantangan dan situasi yang dinamis.

Determinasi adalah faktor kunci utama dalam meraih kesuksesan dan pendukung kemajuan bersama dalam era Masyarakat ASEAN khususnya dalam meningkatkan daya saing. Syarat mutlak untuk memaksimalkan potensi manfaat dan peluang Masyarakat ASEAN adalah daya saing serta kapasitas sumber daya manusia juga institusional yang mumpuni. Faktor untuk memiliki syarat tersebut adalah determinasi yang kuat untuk berbenah diri. Masyarakat ASEAN adalah proses yang akan terus berlangsung, sehingga diperlukan determinasi yang konsisten dalam proses benah diri dan peningkatan daya saing. Hanya dengan determinasi tinggi dan konsisten Indonesia dapat mengkapitalisasi dan memetik manfaat konkret Masyarakat ASEAN untuk maju. Pada tingkat regional, faktor determinasi Indonesia jua yang terus mendorong ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya di tengah-tengah dinamika hubungan internasional. Untuk maju sesuai dengan yang dicita-citakan Masyarakat ASEAN, seluruh negara anggotanya harus menjadi aktor bukan penonton dalam setiap perkembangan dunia yang terjadi.

AP

Presiden RI Joko Widodo saat menandatangani deklarasi simbolis terbentuknya Masyarakat ASEAN, dalam rangkaian KTT ke 27 ASEAN di Kuala Lumpur, 22 November 2015. Pemberlakuan Masyarakat ASEAN bukan merupakan *event* sesaat, melainkan sebuah proses yang akan terus berjalan, untuk mempererat kesatuan ASEAN.

Faktor terakhir yang memperkuat itu semua adalah optimisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan publik dan media dalam memandang Masyarakat ASEAN lebih bersifat pesimis serta negatif. Bahkan berdasarkan pengamatan rutin Redaksi setiap bulannya, lebih dari 60% pemberitaan di media nasional mengenai Masyarakat ASEAN memiliki *tone* yang negatif. Setidaknya ada dua hal yang melatarbelakangi rasa pesimis tersebut; kurangnya pemahaman mengenai Masyarakat ASEAN serta kerja sama ASEAN, dan kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi setelah tanggal 31 Desember 2015. Indonesia hanya dilihat sebagai pasar dan hanya menjadi penonton saja.

Masyarakat ASEAN membawa berjuta peluang dan tantangan. Apabila rasa pesimisme yang lebih mengemuka, maka publik hanya akan melihat tantangan sebagai ancaman. Namun jika publik dan media berani memakai kacamata optimisme, akan tampak berbagai peluang untuk maju yang dibawa Masyarakat ASEAN. Perlu digarisbawahi, Masyarakat ASEAN dibentuk untuk memajukan seluruh negara anggotanya, bukan ajang kompetisi tidak sehat yang saling menjatuhkan. Publik hendaknya perlu lebih sering untuk menggunakan kacamata optimisme dalam melihat tantangan dan peluang ke depan agar dapat menarik potensi manfaat Masyarakat ASEAN dan meraih peluang MEA dengan lebih antusias.

Terlebih, transformasi ASEAN merupakan proses yang terus berlanjut sebagaimana dipertegas oleh para Pemimpin ASEAN dengan diadopsinya Deklarasi Kuala Lumpur "*ASEAN 2025: Forging Ahead Together*" sebagai visi dan komitmen bersama mewujudkan cita-cita Masyarakat ASEAN. Melalui deklarasi tersebut negara anggota ASEAN kembali mengukuhkan pentingnya kerja sama yang semakin intensif di Ketiga Pilar Masyarakat ASEAN agar ASEAN tetap relevan bagi masyarakatnya, kawasan, dan bahkan dunia di tengah dinamika transformasi strategis yang dihadapi.

Konsekuensinya, ada atau tidak ada Masyarakat ASEAN, daya saing dan kemauan untuk bersaing merupakan keniscayaan di era globalisasi dan keterbukaan. Sejarah membuktikan hanya bangsa yang berani bersaing yang mampu memetik peluang. Optimis, dengan proses transformasi dan keberhasilan ASEAN di tiga Pilar (Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya), kawasan ini akan menjadi kawasan yang menarik berbagai peluang dari seluruh belahan dunia.

Waspada, determinasi, dan optimisme. Tiga kata kunci untuk Indonesia agar maju bersama Masyarakat ASEAN.●

PERDAMAIAN DAN STABILITAS KEAMANAN: 'CONDITIO SINE QUA NON' BAGI MASYARAKAT ASEAN

CHANNELNEWSASIA.COM

Para pemimpin negara-negara ASEAN berfoto bersama seusai menandatangani deklarasi simbolis pembentukan Masyarakat ASEAN dalam rangkaian KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia 22 November 2015.

Bentuk kerja sama Politik dan Keamanan ASEAN dalam pilar Polkam Masyarakat ASEAN 2015 terus diperjuangkan agar sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Salah satu capaian dan kontribusi nyata yang diberikan ASEAN bagi negara-negara anggotanya adalah terciptanya perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Bagi ASEAN, perdamaian dan stabilitas keamanan merupakan prioritas yang harus terus diperjuangkan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pembangunan ekonomi dan kemakmuran kawasan.

Berbicara mengenai perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan, tentunya tidak terlepas dari pilar Masyarakat Politik - Keamanan ASEAN. Pilar ini dibangun untuk mempererat kerja sama di bidang politik dan keamanan dengan tujuan menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan, serta memajukan nilai hak asasi manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN. Selain sifatnya yang terbuka, pilar ini didasarkan pada pendekatan keamanan menyeluruh, dan tidak diarahkan untuk membentuk suatu pakta pertahanan/aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*).

Bentuk kerja sama politik dan keamanan ASEAN dalam pilar ini terus diperjuangkan agar sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Perwujudan dari kerja sama tersebut didasarkan pada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti *Zone of Peace, Freedom and Neutrality* (ZOPFAN), *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ), termasuk Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

ZOPFAN merupakan kerangka kerja sama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara,

ANTARANEWS.COM

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menlu Retno Marsudi (kiri) di sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Malaysia.

namun mencakup kawasan yang lebih luas, yaitu Asia Pasifik. Dalam pelaksanaannya, ZOPFAN juga membuka kemungkinan bagi keterlibatan negara-negara besar (*major powers*) dalam penanganan masalah keamanan di kawasan secara konstruktif, dengan berpedoman pada tindakan menahan diri secara sukarela (*voluntarily self-restraints*). Beberapa pedoman tersebut, antara lain tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara, menahan diri terhadap dorongan intervensi dari kekuatan eksternal dalam urusan internal masing-masing negara, menahan diri dari penggunaan kekerasan dan angkatan bersenjata dalam menjalin hubungan internasional, serta menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara damai sejalan dengan Piagam PBB.

Instrumen kedua yaitu TAC yang merupakan salah satu norma penting yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN. Tujuan dari TAC, sebagaimana tersebut pada pasal 1 bab 1 adalah "*to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship*". Prinsip-prinsip TAC pada dasarnya juga tercermin di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seperti, prinsip '*non-interference*' dan penggunaan cara-cara damai dalam memecahkan setiap permasalahan yang timbul di antara negara-negara penandatangan TAC.

Instrumen ketiga, SEANWFZ merupakan traktat atau perjanjian yang bertujuan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas dari nuklir dan segala senjata pemusnah massal lainnya. Penandatangan traktat ini merupakan kontribusi terhadap upaya menuju perlucutan senjata nuklir secara menyeluruh serta mendorong perdamaian dan dari pencemaran lingkungan dan bahaya yang disebabkan oleh sampah radio aktif dan bahan-bahan berbahaya lainnya.

NEGARA PENGAKSESI TAC

Saat ini tercatat 21 negara dan satu entitas di luar anggota ASEAN yang telah mengaksesi ***Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*** (TAC) yaitu:

Papua Nugini (5 Juli 1989)
Republik Rakyat Tiongkok (8 Okt 2003)
India (8 Oktober 2003)
Jepang (2 Juli 2004)
Pakistan (2 Juli 2004)
Korea Selatan (27 Nov 2004)
Federasi Rusia (29 Nov 2004)
Mongolia (28 Juli 2005)
Australia (28 Juli 2005)
SelandiaBaru (28 Juli 2005)
Perancis (13 Januari 2007)
Timor Leste (13 Januari 2007)
Sri Lanka (1 Agustus 2007)
Bangladesh (1 Agustus 2007)
Amerika Serikat (22 Juli 2009)
Turki (23 Juli 2010)
Kanada (23 Juli 2010)
Inggris dan Irlandia Utara (03 Juli 2012)
Uni Eropa (12 Juli 2012)
Brazil (17 November 2012)
Norwegia (01 Juli 2013)

Ancaman dan Potensi Konflik

Meski perdamaian dan stabilitas kemanan telah tercipta selama 48 tahun terakhir, namun tidak berarti kawasan ini terbebas dari ancaman dan potensi konflik. Sebagai

THEDIPLOMAT.COM

Suasana rapat *3rd ASEAN Defence Ministers Meeting Plus* yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia 4 November 2015.

contoh, Laut Tiongkok Selatan yang merupakan wilayah strategis yang berbatasan dengan Brunei Darussalan, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan RRT. Di beberapa bagian wilayah ini terjadi tumpang tindih sehingga menjadikan potensi konflik yang cukup tinggi.

Upaya untuk menghindari konflik serta menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah ini dilakukan secara terus menerus melalui penyusunan berbagai instrumen dan kerja sama konkrit. Pada Juli 1992 para Menlu negara anggota ASEAN mengeluarkan *ASEAN Declaration on the South China Sea* yang antara lain memuat prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong eksplorasi kerja sama terkait dengan keamanan navigasi laut dan koordinasi *Search and Rescue* (SAR). Lalu, sepuluh tahun kemudian ASEAN bersama RRT mengeluarkan *Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea* (DOC) yang antara lain berisikan komitmen dari negara-negara ASEAN dan RRT untuk mematuhi prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. Selain itu, saat ini sedang difinalisasi pembentukan regional *Code of Conduct in the South China Sea* (COC) yang berfungsi sebagai mekanisme operasional pencegahan konflik dan mengatur tata perilaku negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Salah satu bentuk ancaman serius lainnya terhadap stabilitas keamanan kawasan, yaitu kejahatan lintas negara (*trans-national crimes*). Kejahatan ini bersifat kompleks, terorganisir dengan menggunakan teknologi mutakhir dan dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara. Mengingat kejahatan ini berkarakter lintas negara, maka untuk menanganinya mutlak diperlukan upaya kerja sama antara negara.

Dalam upaya memberantas kejahatan lintas negara secara efektf, ASEAN memiliki rencana aksi untuk mengembangkan strategi kawasan secara terpadu guna mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara, dengan fokus pada delapan bidang prioritas, yaitu terorisme, *money laundering, arm robbery at sea/sea piracy, arms smuggling, drugs trafficking, human trafficking, cyber crimes* dan *economic crimes*.

Selain itu, ASEAN memiliki beberapa instrumen terkait dengan kerjasama pemberantasan lintas negara. Di bidang bantuan hukum, ASEAN memiliki *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*. *Treaty* ini menjadi dasar hukum bagi kerja sama ASEAN untuk mengatasi kesenjangan hukum di antara negara anggota untuk penanganan jenis-jenis tindakan kriminal seperti penculikan, pembunuhan, aksi terorisme, pembajakan, pemalsuan dokumen, pencucian uang, dan kejahatan lintas batas negara lainnya.

Khusus untuk kerja sama di bidang pemberantasan terorisme, ASEAN telah memiliki *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang memuat kerja sama komprehensif di bidang pencegahan, penindakan, pemberantasan, program rehabilitasi, dan pengungkapan jaringan terorisme.

Di bidang perdagangan orang (*human trafficking*), belum lama ini para pemimpin ASEAN telah menandatangani *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP). Sebagai sebuah instrument yang mengikat, ACTIP sangat penting untuk dijadikan landasan bagi ASEAN dalam menangani kejahatan perdagangan orang dan meningkatkan kerjasama, baik dalam konteks ASEAN maupun dengan mitra wicara.

Berbagai upaya kolektif terus dilakukan oleh seluruh negara anggota ASEAN untuk menjaga agar kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya senantiasa berada dalam kondisi yang damai, stabil, dan aman. Bagi ASEAN, terpeliharanya perdamaian dan stabilitas keamanan adalah prioritas yang harus terus diupayakan dan diperjuangkan karena hal itu merupakan *'Conditio sine qua non'* atau prasyarat bagi kelanjutan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di kawasan.

Dengan kata lain, tanpa adanya stabilitas dan keamanan di kawasan, maka seluruh negara anggota ASEAN tidak akan dapat fokus dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial budayanya. Demikian juga harapan untuk menjadikan kawasan ASEAN yang lebih maju, sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia dan primadona investor, mustahil dapat terwujud.●

DIT. POLITIK KEAMANAN ASEAN

MEA DAN DINAMIKA EKONOMI TIONGKOK, INDIA DAN DUNIA

SHIPSANDPORTS.COM.SG

Kesibukan bongkar muat di Pelabuhan Singapura, salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Pelabuhan Singapura ini terhubung dengan 600 pelabuhan di 120 negara di dunia.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diimplementasikan pada 31 Desember 2015 ternyata dalam prosesnya memiliki jalan berliku yang cukup panjang. Dari perspektif pembangunan ekonomi, pembentukan MEA merupakan upaya pemimpin ASEAN untuk tetap menjaga ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi. Dinamika perekonomian dunia selalu berubah, tetapi ASEAN selalu merespon dengan sebuah upaya kolektif yang mampu mempertahankan ASEAN sebagai kawasan tujuan utama bagi investor di dunia.

Sejarah mencatat bahwa perubahan kebijakan yang terjadi di Tiongkok dan India membuat perekonomian mereka bangkit dari keterpurukan dan bahkan saat ini telah menjadi kekuatan ekonomi utama di dunia. Perubahan tata kelola perekonomian di Tiongkok dan India sedikit banyak memegang peranan dalam tiga peristiwa penting yang akhirnya membawa ASEAN dalam membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015.

Tercetusnya ASEAN Vision 2020(1997)

Indonesia pada tahun 1990-an merupakan salah satu negara Asia yang pertumbuhan ekonominya rata-rata diatas 7% per tahun. Bank Dunia pernah menyebut Indonesia sebagai salah satu macan Asia bersama Hongkong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Kelima negara tersebut juga dikenal sebagai '*The East Asian Miracles*'.

Pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut merupakan hasil kombinasi dari perbaikan infrastruktur dan peningkatan arus investasi yang ditopang oleh sumber daya manusia yang baik di kawasan. Kombinasi kedua faktor ekonomi tersebut mendorong daya saing di kawasan dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Beberapa kebijakan ekonomi negara Asia saat itu, termasuk Indonesia, difokuskan untuk mendorong ekspor dengan modal investasi yang didatangkan dari pinjaman asing. Akibatnya, rasio hutang terhadap Produk Domestik Bruto di beberapa negara Asia meningkat dan mengalami defisit anggaran serta adanya resiko pertukaran valuta asing dalam sektor finansial.

Sampai tahun 1996, Asia berhasil menarik lebih dari setengah aliran modal asing ke negara-negara berkembang. Namun, secara perlahan para pelaku ekonomi global merelokasikan investasinya ke negara dengan upah buruh yang lebih murah, yakni Tiongkok dan India.

Bila kita melihat apa yang terjadi di Tiongkok pada akhir tahun 1992, Partai Komunis Tiongkok mereformasi ekonomi dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Sejak itu Tiongkok menerapkan kebijakan perekonomian terbuka dengan bersedia menerima investasi asing dan transfer teknologi guna menunjang perekonomiannya.

Sementara itu, aktivitas ekonomi India sejak merdeka tahun 1947 sampai tahun 1990 berjalan sangat lamban. Kondisi ini akibat kebijakan ekonomi yang tidak pro pasar, campur tangan pemerintah yang sangat kuat, dan mengandalkan substitusi impor. Akibatnya terjadi kesulitan neraca pembayaran yang akhirnya memaksa India pada tahun 1991 melakukan reformasi di berbagai bidang.

Perubahan ini berdampak positif pada ekonomi India yang tercermin dari peningkatan perdagangan luar negeri, aliran modal asing mengalir deras baik dalam bentuk portofolio serta investasi asing langsung, dan aktivitas ekonomi yang mulai bergairah.

Reformasi politik dan ekonomi di Tiongkok dan India mendorong para pelaku usaha global menanamkan investasi di kedua negara tersebut. Upah tenaga kerja yang murah dan kebijakan pemerintah yang terbuka membuat investasi dan pertumbuhan ekonomi di kedua negara itu terus meningkat. Akibatnya, investasi asing di Indonesia keluar dan pindah ke Tiongkok atau India.

Sementara perekonomian negara ASEAN memburuk, Tiongkok dan India justru semakin menguat. Menyikapi hal itu, para pemimpin negara ASEAN berupaya mencari solusi bersama dengan mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan yang semakin berkurang.

Akhirnya pada tahun 1997, kepala negara ASEAN sepakat melakukan transformasi kawasan ASEAN melalui penandatanganan dokumen *ASEAN Vision 2020* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur Malaysia:

"We will create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN Economic Region in which there is a free flow of goods, services and investments, a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities"

Lahirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Lima tahun pasca Asia Tenggara mengalami krisis moneter, perekonomian negara-negara ASEAN perlahan mulai membaik. Namun demikian, kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih dari dampak krisis moneter 1998 dan ditambah dengan adanya konflik politik perang Irak yang membuat harga minyak tidak terkendali.

Sementara itu, perekonomian Tiongkok tidak memperlihatkan perlambatan dan bahkan terus semakin kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 2 *digit* setiap tahunnya, terlebih setelah Tiongkok resmi menjadi anggota WTO mulai tanggal 11 Desember 2001.

Bagi Tiongkok, menjadi anggota WTO berarti membuka pintu investasi asing ke dalam pasar domestik dan meningkatkan ekspor domestik. Perdana Menteri (PM) Zhu Rongji (1998-2003) menyampaikan bahwa motivasi besarnya mendorong Tiongkok sebagai anggota WTO adalah memacu reformasi sektor industri dan jasa yang lesu karena sebelumnya dipimpin oleh rezim militer.

Masuknya investasi asing berarti membuka kompetisi bagi pengusaha Tiongkok agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya. Tiongkok menjadi sangat ekspansif terhadap pasar luar negeri karena memperoleh "energi" tambahan dalam bentuk investasi asing. Faktor tenaga kerja murah, kemudahan bahan baku dan stabilitas politik menjadi alasan kuat bagi investor asing untuk datang ke Tiongkok.

Industri manufaktur Tiongkok berkembang pesat dan mendominasi ekspornya. Tiongkok menjadi eksportir besar dunia karena mampu mencapai surplus besar dalam neraca perdagangannya. Setelah menjadi anggota WTO, Tiongkok memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan sayap bisnisnya. Jika dulu Tiongkok menjadi tujuan investor, belakangan banyak pengusaha Tiongkok yang berinvestasi ke negara lain, terutama negara berkembang. Pengaruh ekonomi Tiongkok sangat besar dan menyaingi Barat, terutama AS.

Pada tahun 2003, Indonesia menjadi tuan rumah KTT ke-9 ASEAN dan para pemimpin negara ASEAN saat itu menyepakati *Bali Concord II* untuk meningkatkan integrasi melalui perwujudan Masyarakat ASEAN yang memiliki tiga pilar, yaitu pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Ketiga pilar tersebut saling memperkuat untuk mencapai cita-cita membentuk kawasan ASEAN yang mampu bersaing dengan kawasan lainnya.

ASEAN telah mampu membuktikan menjadi kawasan yang stabil dan relatif aman dari konflik. Sementara itu, Masyarakat ASEAN juga sudah semakin harmonis dan mampu hidup berdampingan dengan saling mendukung kemajuan masyarakat negara masing-masing. Dan masyarakat ekonomi ASEAN yang akan diimplementasikan diharapkan mampu mentransformasi ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menarik perhatian para pelaku ekonomi global yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan di kawasan ASEAN.

Percepatan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Empat tahun sejak dicetuskan pembentukan Masyarakat ASEAN dalam *Bali Concord II*, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN semakin baik dan ada pertimbangan para kepala negara ASEAN untuk mempercepat perwujudan *ASEAN Vision* dari 2020 menjadi 2015.

Dalam KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina yang diselenggarakan pada 13 Januari 2007, para pemimpin

SLIDESHARE

negara ASEAN menyepakati *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishement of an ASEAN Community 2015*. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Seiring dengan upaya perwujudan masyarakat ASEAN, ASEAN juga telah menyepakati untuk menyusun semacam konstitusi yang akan menjadi landasan dalam penguatan kerjasamanya. Dalam kaitan ini, ASEAN sejak tahun 2006 telah memulai proses penyusunan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2008 dan dalam rangka mencapai masyarakat ASEAN 2015, ASEAN juga menyusun *blueprint* (cetak biru) dari ketiga pilar sebagai merupakan program aksi untuk memperkuat kerja samanya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015)

Tanggal 31 Desember 2015 bukanlah garis finis di mana semua upaya ASEAN untuk membangun kawasan yang berdaya saing berakhir. Tidak ada negara ASEAN yang menang dan tidak ada yang kalah. Dengan adanya MEA, semua negara ASEAN saat ini memiliki kawasan yang menjadi pilihan utama investor dunia.

Dunia saat ini sedang mengalami ketidak-pastian ekonomi global yang ditandai dengan krisis keuangan di Eropa, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan manufaktur di Tiongkok, serta fluktuasi harga bahan bakar minyak dunia, dan di tengah keperkasaan nilai tukar dolar AS serta kelesuan ekonomi global dan ancaman terorisme internasional.

Kawasan ASEAN saat ini telah menjadi kawasan yang relatif aman dari konflik bersenjata, relatif tidak ada pertentangan di antara negara anggota, dan saat ini bersama-sama membentuk sebuah kawasan produksi ekonomi yang modern sekaligus menjadi pasar yang memiliki daya beli tinggi.

Semua hal tersebut telah menjadi cita-cita pemimpin ASEAN sejak tahun 1997 untuk melakukan integrasi ekonomi ASEAN guna mencapai kemakmuran masyarakat yang merata dan berkelanjutan melalui penciptaan pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, serta kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Untuk ke depannya, ASEAN saat ini sedang menyusun kerangka kerja sama penguatan masyarakat ekonomi ASEAN sampai dengan tahun 2025 dengan fokus untuk menciptakan kawasan yang terintegrasi dengan struktur ekonomi yang kohesif dan berdaya saing, inovatif, dan dinamis, serta memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis dan berpengaruh global. •

DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

Melemahnya Ekonomi Negara ASEAN pada 1998

Pada Juni 1997, Indonesia terlihat jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan *surplus* lebih dari 900 juta dolar, persediaan mata uang asing yang besar, dan sektor bank yang baik. Di lain pihak, banyak perusahaan Indonesia meminjam dolar AS yang mengakibatkan rupiah melemah terhadap nilai dolar AS.

Pada Agustus 1997, Otoritas Moneter Indonesia mengganti kebijakan pertukaran valuta asing mengambang-teratur dengan pertukaran mengambang-bebas. Ini, menyebabkan nilai mata uang rupiah semakin jatuh karena ketakutan dari adanya hutang perusahaan, penjualan rupiah, dan permintaan dolar yang kuat. Rupiah dan Bursa Saham Jakarta menyentuh titik terendah pada bulan September. Bahkan lembaga pemeringkat hutang Moody's menurunkan status hutang jangka panjang Indonesia menjadi *"junk bond"*.

TABEL PENURUNAN NILAI MATA UANG NEGARA ASEAN TERHADAP DOLAR AS

MATA UANG	JUN '97	JUL '98	PERUBAHAN
THB	24,50	41	▼ 40,2%
IDR	2.380	14.150	▼ 83,2%
PHP	26,30	42,00	▼ 37,4%
MYR	2,50	4,10	▼ 39,0%
KRW	850	1.290	▼ 34,1%

Sumber: Bank Dunia

MENUJU MASYARAKAT SOSIAL BUDAYA ASEAN

Selama hampir lima dasa warsa ASEAN telahmengalami banyak perkembangan. Diantaranya, transformasi menuju pembentukan Masyarakat ASEAN yang ditopang oleh tiga pilar, salah satunya yaitu pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Berbagai perkembangan dan capaian telah diraih dalam pilar ini, dan itu menjadi bekal untuk mengimplementasikan visi ASEAN Post 2015.

THEPENINSULAQATAR.COM

Sejak dibentuk pada tahun 1967, *Association of South East Asian Nations* atau ASEAN telah menjadi prioritas utama implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bertambahnya anggota ASEAN secara bertahap dari yang semula lima negara menjadi sepuluh negara, dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Myanmar dan Vietnam, telah mengubah ASEAN menjadi organisasi regional yang semakin maju dan kuat.

ASEAN telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Beberapa tahapan penting telah ditempuh dalam upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan peningkatan kesejahteraan di kawasan. Pada tahun 1976 para pemimpin ASEAN menandatangani *Bali Concord I* yang menyepakati program aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan peningkatan mekanisme ASEAN.

Selanjutnya para pemimpin ASEAN bersepakat untuk membentuk kawasan Asia Tenggara menjadi suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat yang terbuka, sejahtera, saling peduli, dan terikat dalam kemitraan yang dinamis. Untuk mewujudkan harapan itu, pada tahun 2003 disahkan *Bali Concord II* yang menyepakati pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2020, yang ditopang oleh tiga pilar, yaitu pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Pada awal 2007, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 melalui *Cebu Declaration on the Acceleration of an ASEAN Community* di Cebu, Filipina. Selain itu disepakati pula penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) sebagai pedoman pembentukan Masyarakat ASEAN di ketiga pilar. Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN disahkan pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009 di Cha Am Hua Hin, Thailand.

Tidak hanya berhenti sampai di situ. Langkah tegas berikutnya untuk memperkokoh kerjasama ASEAN adalah perumusan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) sebagai dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN. Piagam tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 15 Desember 2008, dan sejak itu ASEAN bertransformasi dari sebuah organisasi yang longgar *(loose association)* menjadi organisasi yang berdasarkan hukum *(rules-based organisation)* dan berorientasi pada masyarakat *(people-centered)*.

Seiring dengan semakin berkembangnya kerja sama ASEAN di bidang sosial-budaya, semakin meningkat pula tantangan yang dihadapi ASEAN dalam berbagai isu tertentu.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 21-22 November 2015, Sekjen ASEAN menyampaikan bahwa tingkat implementasi 339 *action lines* dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN telah tercapai 100%.

KTT tersebut juga telah mengesahkan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 yang mempunyai karakteristik dan elemen sebagai berikut: *i) engages and benefits people; ii) inclusive; iii) sustainable; iv) resilient; dan v) dynamic*. Dengan disahkannya Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, diharapkan kesinambungan akan terus terjadi dalam upaya mewujudkan Masyarakat ASEAN yang saling terkoneksi, peduli dan berbagi dalam kesatuan dengan keberagaman. •

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

DIMENSI KERJA SAMA MASYARAKAT SOSIAL BUDAYA ASEAN

RIGHTMAN.CO.TH

Pembukaan *ASEAN Cultural Centre* di Bangkok, Thailand pada 7 Agustus 2015, salah satu bentuk kerja sama sosial budaya ASEAN.

Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*/ ASCC) merupakan bagian dari tiga pilar penting yang saling terkait untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN yang kita masuki di penghujung tahun 2015. Walaupun isu kerja sama sosial budaya ASEAN dapat dikatakan kalah pamor dibanding dengan pilar lainnya seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), isu kerja sama sosial budaya sebenarnya justru banyak melibatkan peran *people-to-people contact* sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dari Masyarakat ASEAN. Yakni, untuk mewujudkan integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*) dan berorientasi pada masyarakat (*people-oriented*).

Selain itu, kerja sama sosial budaya ASEAN juga memiliki cakupan bidang yang sangat luas. Ini tercermin dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang memiliki 339 *action lines*, terbanyak dibanding cetak biru yang lainnya. Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN merupakan pedoman utama bagi negara-negara anggota ASEAN dalam melaksanakan langkah aksi menuju terbentuknya Masyarakat ASEAN 2015 di pilar sosial budaya.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN yang baru selesai dilaksanakan pada tanggal 21-22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, Sekjen ASEAN dalam laporannya mengenai *Consideration of Reports on the Work of ASEAN* menyampaikan bahwa tingkat implementasi 339 *action lines* dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN telah tercapai 100%.

KTT ke-27 ASEAN juga telah mengesahkan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 yang mempunyai karakteristik dan elemen sebagai berikut: *i) engages and benefits people; ii) inclusive; iii) sustainable; iv) resilient;* dan *v) dynamic*. Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025 bertujuan untuk meningkatkan komitmen, partisipasi dan tanggung jawab sosial dari masyarakat ASEAN; mempromosikan akses yang sama dan kesempatan bagi semua, serta memajukan dan melindungi hak asasi manusia; mempromosikan pembangunan sosial yang seimbang dan lingkungan yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan; meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk secara kolektif merespon dan beradaptasi dengan segala ancaman dan tantangan yang muncul; dan memperkuat kemampuan untuk terus berinovasi dan menjadi anggota proaktif dari masyarakat global.

Dengan disahkannya Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, diharapkan kesinambungan akan terus terjadi dalam upaya mewujudkan Masyarakat ASEAN yang saling terkoneksi, peduli dan berbagi dalam kesatuan dengan keberagaman. Berikut dimensi kerja sama sosial budaya ASEAN.

Kebudayaan

Pendirian *ASEAN Cultural Centre* di Bangkok, Thailand yang secara resmi dibuka pada 7 Agustus 2015 untuk melestarikan warisan budaya ASEAN serta meningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ASEAN.

Kesehatan

Penyelesaian *ASEAN Post 2015 Health Development Agenda* periode 2016-2020 dengan prioritas untuk mempromosikan gaya hidup sehat; merespon semua bahaya dan ancaman yang muncul, termasuk manajemen kesehatan bencana, memperkuat sistem kesehatan dan akses ke perawatan, dan memastikan keamanan pangan.

Informasi

Peluncuran *website ASEAN Virtual Learning Resource Centre* (AVLRC), http://learning.asean.org/, pada bulan Maret 2015 sebagai salah satu dari 15 prioritas proyek *Master Plan on ASEAN Connectivity*.

Kepemudaan

Kerja sama di bidang ini antara lain ditekankan pada Penyusunan *ASEAN Youth Development Index* sebagai salah satu *action line* Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Olahraga

Sektor olahraga memiliki kontribusi penting terhadap *people-to-people contact* menuju pembentukan Masyarakat ASEAN 2015. Untuk itu ASEAN membuat sejumlah inisiatif

baru di bidang olah raga, seperti pembentukan *centre of excellence* bidang olahraga, peningkatan infrastruktur keolahragaan, dan penjajakan partisipasi ASEAN dalam *bidding* tuan rumah FIFA World Cup *bid* tahun 2034.

Perempuan dan Anak

Sebagai wujud komitmen bersama ASEAN untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,KTT ke-27 ASEAN pada November 2015 telah mengadopsi *ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence against Women dan ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence against Children*.

Ketenagakerjaan

Dalam upaya memberikan perlindungan bagi para pekerja migran di kawasan tanpa membeda-bedakan status serta memberikan perlindungan bagi anggota keluarga pekerja migran, tengah merumuskan *ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of the Migrant Workers*. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada Oktober 2015.

Civil Service/Layanan Sipil

Kerja sama ASEAN di bidang kepegawaian dan administrasi dilakukan melalui *ASEAN Conference on Civil Service Matters* (ACCSM). Forum ini bertujuan sebagai wahana tukar menukar pandangan dan pengalaman untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajeman publik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Untuk meningkatkan kerja sama pada isu *civil service*, KTT ke-27 ASEAN telah mengadopsi *Putrajaya Joint Declaration on ASEAN Post-2015 Priorities Towards an ASEAN Citizen-centric Civil Service*.

Pendidikan

Kerja sama sektor pendidikan dimulai dengan pembentukan Organisasi Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (*South East Asian Ministers of Education Organization/SEAMEO*).

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kerja sama di bidang ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan jumlah tenaga ahli ASEAN di sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), mendorong alih teknologi, memberikan dukungan dan bantuan dalam pengembangan aplikasi temuan dan riset. Rencana strategis ASEAN di bidang IPTEK, yaitu *ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation* (APASTI) 2016-2025 telah diadopsi pada November 2015 sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan ASEAN di bidang ini.

Penanggulangan Bencana

Salah satu bentuk kerja sama ASEAN dalam penanggulangan bencana adalah pembangunan *AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management)*. Lembaga ini bertujuan memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antar para pihak, termasuk dengan badan-badan PBB dan organisasi internasional yang relevan untuk mendorong kolaborasi ASEAN dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi penanggulangan bencana.

Lingkungan Hidup

Tiga isu yang menjadi perhatian utama dalam kerja sama ASEAN di bidang lingkungan hidup adalah masalah pencemaran asap, konservasi dan keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Pada 29 Oktober 2015, Indonesia ditetapkan menjadi tuan rumah *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control*, yang berfungsi sebagai pusat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas di kawasan. Pada KTT ke-27 ASEAN, diadopsi *Joint Statement on Climate Change* dan *ASEAN Post-2015 on Environmental Sustainability and Climate Change Agenda*.

Pembangunan Pedesaan dan Penanggulangan Kemiskinan

Kerja sama ASEAN di bidang ini menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Selain itu itu ditekankan juga kerja sama di bidang pembangunan sosial dan ekonomi dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. *The 2nd ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication* tahun 2015 diberikan kepada sepuluh organisasi non-pemerintah atas kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan masyarakat.

Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Kerja sama di bidang ini didasari oleh semangat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Di bawah *Strategic Framework on Social Welfare and Development* (2011-2015), ASEAN terus melaksanakan proyek dan kegiatan yang berkaitan dengan orang tua, anak-anak, penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya.●

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

ISU ASAP LINTAS BATAS JADI PERHATIAN PARA PEMIMPIN ASEAN

Isu pencemaran asap lintas batas telah menjadi pembicaraan hangat di dalam negeri dan dunia internasional beberapa waktu belakangan. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi negara yang paling terkena dampak dari peristiwa tersebut. Belasan ribu warga di keempat negara tersebut menjadi korban dari peristiwa kabut asap lintas batas. Pencemaran kabut asap yang terjadi disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang jamak terjadi di kawasan lahan gambut. Parahnya kondisi saat ini disebabkan oleh musim kemarau dan fenomena El Nino yang berkepanjangan di tahun 2015. Akibatnya kualitas udara di area yang terkena dampaknya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi tersebut dipandang sebagai yang terburuk selama lebih dari dua dekade.

Isu pencemaran asap lintas batas ini menjadi pembahasan sentral dalam rangkaian Pertemuan ke-13 *ASEAN Ministerial Meeting on the Environment* (AMME) di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 26-30 Oktober 2015 yang lalu. Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota ASEAN menyatakan dapat memahami permasalahan yang dihadapi Indonesia termasuk pengaruh El Nino yang berkepanjangan, dan memberikan penghargaan kepada Indonesia atas upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan. Seluruh negara anggota ASEAN juga menyatakan kesediaannya untuk membantu apabila diperlukan.

Selain itu, pada tanggal 29 Oktober 2015 diselenggarakan Pertemuan ke-11 Negara-negara Pihak pada Persetujuan ASEAN mengenai Asap Lintas Batas (*11th Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP)/COP-11). COP-11 merupakan momen penting karena dalam pertemuan itu Indonesia pertama kali duduk sebagai negara pihak yang telah meratifikasi AATHP. Sebelumnya, meskipun Indonesia belum meratifikasi AATHP, Indonesia juga telah berpartisipasi dan berkontribusi pada COP.

Pencemaran asap lintas batas dari wilayah Indonesia yang mengganggu di Singapura. Isu ini menjadi pembahasan sentral dalam pertemuan ke-13 AMME di Hanoi, Vietnam.

Pertemuan tingkat menteri itu membahas kerja sama regional dalam isu pencemaran asap lintas batas, terutama langkah-langkah yang diambil di bawah kerangka AATHP. Pertemuan juga membahas inisiatif baru untuk lebih meningkatkan kerja sama dalam mengatasi pencemaran asap lintas batas. Beberapa inisiatif ASEAN untuk mencegah berulangnya pencemaran asap lintas batas adalah disepakatinya penyusunan Peta Jalan Menuju ASEAN Bebas Pencemaran Asap (*The Roadmap for Haze-Free ASEAN*), serta penetapan Indonesia menjadi tuan rumah *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC).

Indonesia dipandang sebagai negara yang tepat untuk menjadi tuan rumah ACC. Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan negara pihak lainnya di bidang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengawaki ACC tersebut.

Dengan ditetapkannya lokasi ACC di Indonesia, kini Indonesia menjadi tuan rumah dari berbagai kantor regional dan multilateral. Kantor yang saat ini berada di Indonesia antara lain adalah: *United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER) Regional Support Office*, serta *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management* (AHA Centre).

Pencemaran asap lintas batas juga menjadi salah satu isu yang diangkat oleh beberapa negara anggota ASEAN pada sesi pleno Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN pada tanggal 21-22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden RI Joko Widodo secara khusus menyinggung masalah isu pencemaran asap. Presiden menyampaikan tingginya perhatian dan prioritas yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani isu tersebut, termasuk berbagai upaya yang telah dilakukan. Presiden juga menekankan bahwa dalam situasi sulit seperti ini, semangat kerja sama harus diutamakan di antara negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi pencemaran asap lintas batas.

Indonesia berkomitmen untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya. Langkah-langkah penting yang telah disusun Indonesia seperti penyusunan *One Map Policy*, penetapan moratorium ijin pemanfaatan lahan gambut, peninjauan ulang perijinan, serta pemulihan ekosistem gambut menunjukkan tingkat keseriusan Indonesia yang sangat tinggi dalam menangani pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan. ●

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

13TH ASEAN POLITICAL AND SECURITY COMMUNITY COUNCIL-APSC MEETING

RENCANA AKSI PILAR POLKAM SUDAH TUNTAS TERIMPLEMENTASI

BUSINESSTIMES.COM.SG

Para peserta *ASEAN Political and Security Community Council* (APSC) *Meeting* yang diselenggarakan di Kuala Lumpur November lalu.

ASEAN *Political and Security Community* (APSC) telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya pemeliharaan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. Hal ini mengemuka pada Pertemuan ke-13 APSC yang diselenggarakan dalam rangkaian KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia yang baru lalu.

Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh dalam pidatonya menyampaikan tentang kemajuan implementasi *APSC Blueprint*. Menurutnya, per tanggal 20 November 2015 seluruh langkah aksi *APSC Blueprint* yaitu sebanyak146 langkah aksi, telah terlaksana. Sementara sejumlah langkah aksi yang bersifat berkelanjutan dimasukkan ke dalam *APSC Blueprint 2025* untuk diimplementasikan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan.

> **“*Per tanggal 20 November 2015 seluruh langkah aksi APSC Blueprint yaitu sebanyak 146 langkah aksi, telah terlaksana.***
>
> **Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh**

Meski APSC dinilai telah mencapai kemajuan dalam memelihara perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan perkembangan kerja sama ASEAN di bawah pilar APSC dan implementasi *APSC Blueprint*. Hal tersebut antara lain, koordinasi antar badan sektoral ASEAN dan antar ketiga pilar Masyarakat ASEAN perlu ditingkatkan. Kapabilitas ASEAN dalam menjawab berbagai tantangan secara tepat waktu dan efektif perlu diperkuat. ASEAN perlu bersatu dalam mencapai tujuannya, proaktif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada, dan efektif dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah diputuskan. Sentralitas ASEAN dalam melakukan hubungan dengan mitra eksternal perlu terus dipelihara.

Beberapa hal penting lainnya yang mengemuka dalam Pertemuan, yaitu disepakatinya *First List and Second List of Commonalities*, yaitu Pertemuan *10th ASEAN-China SOM on the Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang telah memasuki fase baru, konsultasi mengenai seluruh isu yang kompleks

dan krusial terkait *Code of Conduct of the Parties in the South China Sea* (COC), termasuk di dalamnya struktur dan elemen COC. Terkait isu Laut Tiongkok Selatan ini, Pertemuan menekankan pentingnya berbagai pihak untuk menahan diri dari mengambil tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas, serta menjamin kebebasan berlayar dan *over-flight* di wilayah Laut Tiongkok Selatan. ASEAN perlu terus menjamin implementasi DOC secara penuh, finalisasi COC secepat mungkin, dan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan prinsip dan hukum internasional.

Terkait isu kawasan bebas senjata nuklir, ASEAN perlu melanjutkan konsultasi baik secara internal maupun dengan *Nuclear Weapon States* (NWS) untuk menyelesaikan *outstanding issues*, utamanya berkenaan dengan penandatanganan dan ratifikasi *Protokol Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ) sesuai tujuan dan prinsip dari traktat tersebut, termasuk reservasi oleh NWS dan penandatangan Protokol secara bertahap.

Di bidang kerjasama energi nuklir, sebuah lembaga baru yaitu *ASEAN Network of Regulatory Bodies on Atomic Energy* (ASEANTOM) telah dicantumkan dalam *Annex 1* Piagam ASEAN, sebagai badan sektoral ASEAN.

Work Plan ASEAN Regional Forum (ARF) di bidang *disaster relief, counter-terrorism*, dan *maritime security* telah diperbaharui untuk diimplementasikan dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Selain itu, *Work Plan on Security of and in the Use of Information and Technologies* telah diadopsi untuk merespon ancaman keamanan di dunia saiber.

Di bidang kerja sama pertahanan, terdapat 3 kemajuan, yakni: (a) dimulainya *Direct Communication Link* antar Menteri Pertahanan ASEAN pada tahun 2016; (b) perkembangan TOR dari *ASEAN Centre of Military Medicine* (ACMM) dan peluncurannya pada tahun 2015; dan (c) pengesahan *Standard Operating Procedure on the Utilisation of Military Assets in Humanitarian Assistance and Disaster Management* (HADR). Dalam kerangka ADMM-Plus, sejumlah latihan bersama akan dilaksanakan pada tahun 2016.

MINDEF.COM

Para peserta *3rd ASEAN Defence Ministers' Meeting* yang diselenggarakan di Langkawi, Malaysia, Maret 2015.

Terkait isu perdagangan orang, KTT menyepakati *ASEAN Convention Against Trafficking in Person* (ACTIP), dan *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (APA) telah disahkan oleh *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) pada September 2015. Sedangkan area kerja sama dan ruang lingkup tanggung jawab AMMTC diperluas dengan dimasukkannya perdagangan *ilegal* hewan liar dan penyelundupan manusia.

Special ASEAN Ministerial Meeting on the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (SAMMRRVE) telah diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Oktober 2015 untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam rangka pengimplementasian Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 *"Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts"*.

KTT juga mengingatkan kembali bahwa Pertemuan ke-4 *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters* (AMMD) di Langkawi, Malaysia tanggal 29 Oktober 2015 telah mengesahkan Pernyataan Posisi ASEAN yang menerapkan *zero-tolerance* terhadap narkoba (*drugs*), untuk selanjutnya akan disampaikan pada *the 59th Session of the Commission on Narcotic Drugs* (CND) bulan Maret 2016 dan t*he United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) on the World Drug Problem* bulan April 2016.

Pertemuan ke-9 *ASEAN Law Ministers Meeting* (ALAWMM) di Bali tanggal 18-22 Oktober 2015 sepakat untuk meningkatkan *the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) menjadi sebuah instrumen ASEAN dan mempercepat finalisasi teks *the Model ASEAN Extradition Treaty*.

Menghadapi fase berikutnya, komitmen dan kepemimpinan Indonesia yang kuat di ASEAN perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dalam implementasi *APSC Blueprint* 2025 ke depan. Indonesia melalui berbagai *focal point* di kementerian/lembaga terkait diharapkan dapat lebih proaktif dalam memperkuat kerja sama ASEAN dan memelihara sentralitas ASEAN di masing-masing badan sektoral di bawah pilar APSC. Untuk itu diperlukan koordinasi dan konsolidasi yang lebih baik di dalam negeri guna memperkuat peran kepimpinan Indonesia di ASEAN dalam mewujudkan visi ASEAN 2025. ●

DIT. POLITIK KEAMANAN ASEAN

INDONESIA GAGAS STANDAR PR DI ASEAN

INFOMONETER.COM

Pembentukan *ASEAN Public Relations Network* (APRN) pada tanggal 2 Juni 2014 di ASEAN Sekretariat, Jakarta.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan langkah transformasi ASEAN menjadi suatu kawasan ekonomi yang kompetitif . Melalui MEA diharapkan ASEAN akan menjadi pasar dan basis produksi tunggal yang ditandai dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan arus modal yang lebih bebas. Melalui MEA diharapkan ASEAN akan merasakan pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi penuh ke dalam ekonomi dan global.

Salah satu sektor yang perlu diperhatikan oleh negara-negara ASEAN dengan keberadaan MEA adalah *Public Relations*. Mengapa? Karena *Public Relations* memiliki kekuatan untuk mempercepat proses sosialisasi mengenai MEA melalui menyebaran informasi berbagai aktivitas negara-negara ASEAN untuk menyambut MEA

MEA juga membuka peluang bagi banyak perusahaan untuk dapat memperluas perdagangan ditingkat regional. Di sinilah peran para praktisi *Public Relations* untuk membawa reputasi perusahaan pada pada *level* regional di ASEAN. Sementara itu, di sisi yang lain keberadaan MEA tentu saja membuka peluang terbukanya lapangan kerja tingkat regional. Para praktisi *Public Relations* dapat bekerja di berbagai perusahaan di negara-negara ASEAN.

> **“Prita Kemal Gani tidak sekadar memajukan Humas Indonesia, tapi juga memajukan Humas ASEAN, dengan menggagas ASEAN Public Relations Network (APRN).**

Namun demikian, untuk dapat menangkap peluang tersebut, para praktisi *Public Relations* perlu meningkatkan kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan dan diakui

oleh negara-negara ASEAN.

Bagaimana dengan Indonesia? Saat ini, Indonesia memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana dengan ASEAN? Pada titik inilah, pertanyaan besar yang dihadapi setiap praktisi *Public Relations* yang berada pada kawasan ASEAN adalah "Seberapa besar kesiapan kita menghadapi perubahan transformasi profesi *Public Relations* yang seirama dengan integrasi ASEAN?

Hal ini yang menjadi salah satu pertimbangan Prita Kemal Gani MBA MCIPR, APR Pendiri dan Ketua LSPR-Jakarta memprakarsai dibentuknya *ASEAN Public Relations Network* (APRN) pada tanggal 2 Juni 2014 di ASEAN Sekretariat, Jakarta. Organisasi ini beranggotakan para praktisi dan akademi *Public Relations* di seluruh kawasan ASEAN. Pembentukan APRN ini disambut baik dan didukung oleh *Institute of Public Relations, Singapore (IPRS), Public Relations of the Philippines (PRSP)* dan *Institute of Public Relations Malaysia (IPRM)*.

Seiring dengan berlakunya MEA maka dipastikan adanya keperluan untuk menstandarisasi profesi *Public Relations* yang dapat diakui oleh seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini dijawab oleh APRN dengan membuat *framework* kompetensi untuk *Public Relations* yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara ASEAN. Pengembangan profesi *Public Relations* harus dilengkapi dengan *outward looking* yang melihat tuntutan standar kompetensi yang harus dipenuhi tidak hanya secara internal (baca: penyesuaian dengan kondisi negara setempat) namun juga eksternal guna memenuhi tuntutan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara ASEAN.

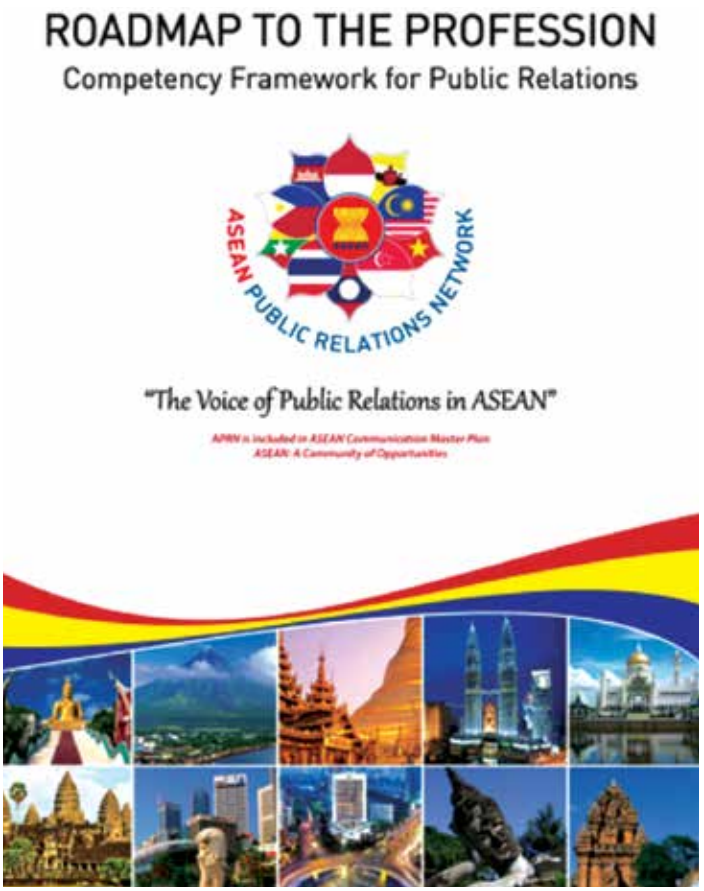

Sebagai asosiasi profesional *Public Relations* tingkat regional maka APRN memiliki tanggung jawab untuk membuat rencana pengembangan standar kompetensi profesi *Public Relations* tingkat ASEAN. Pengembangan standar profesional harus berdasarkan pada dua hal, yaitu akademik dan praktek professional. Untuk mendukung pengembangan standar kompetensi profesi *Public Relations* tingkat ASEAN, maka APRN bekerjasama dengan *Centre For ASEAN Public Relations Studies*, (CAPRS LSPR-Jakarta) melakukan berbagai penelitian terkait kompetensi *Public Relations* seperti penetapan standar kompetensi dan praktek *digital public relations* di Indonesia dan implementasi penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia dan Malaysia.

APRN memandang perlu adanya kompetensi *digital public relations* karena saat ini media sosial merupakan salah satu alat komunikasi kepada publik yang dapat melintasi batas geografi wilayah negara maka mau tidak mau praktisi *Public Relations* harus memiliki *skill* dan *abilities* mengenai *media and social channels*. Kaitannya dengan kajian *Corporate Social Responsibility* (CSR), bahwa kajian ini dapat menjadi pembeda yang mewakili perspektif negara berkembang di ASEAN pada khususnya dan ASIA pada umumnya. Kajian CSR penting untuk dimasukkan dalam area pekerjaan *Public Relations* karena masih beragamnya pemahaman mengenai CSR, apakah kewajiban perusahaan atau *voluntary basis*.

Dengan demikian, diharapkan keberadaan APRN dapat menjadi jembatan para praktisi *Public Relations* untuk mengambil peran strategis dalam MEA yang akan segera diberlakukan pada penghujung tahun 2015. ●

YULIANA RIANA P, MM
HEAD OF CENTRE FOR ASEAN PR STUDIES, LSPR JAKARTA

EAS RAPID DISASTER RESPONSE: SEARCH AND RESCUE LESSONS LEARNED SEMINAR

INDONESIA BERBAGI PENGALAMAN TENTANG SAR

> ***Tim SAR Indonesia mendapatkan apresiasi dan diakui keunggulannya karena telah mampu menemukan pesawat Air Asia QZ 8501 secara cepat, hanya dalam waktu tiga hari sejak dinyatakan hilang kontak pada tanggal 28 Desember 2014. Pencapaian tersebut dicatat sebagai sebuah prestasi yang luar biasa, dan Tim SAR Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia.***

Berdasarkan laporan Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP), sepanjang tahun 2014, kawasan Asia Pasifik mengalami 119 bencana, atau sekitar 52,7%, dari 226 bencana yang terjadi di dunia. Meskipun telah satu tahun tanpa adanya satu bencana skala besar yang diakibatkan oleh gempa bumi atau Tsunami, wilayah ini telah mengalami badai, banjir lintas batas dan tanah longsor, yang menyumbang 85 persen dari semua bencana.

Selain itu, bencana alam pada tahun 2014 telah menyebabkan 6.000 korban jiwa, dan kerugian ekonomi mencapai $59,6 juta, serta diperkirakan 79.6 juta orang terkena dampak, menurut laporan tersebut.

Peristiwa Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 telah mengingatkan negara-negara di Asia Pasifik mengenai pentingnya kerja sama yang lebih erat dalam penanggulangan bencana. Pelajaran dari 2014 jelas menunjukkan bahwa membangun ketahanan dalam penanggulangan bencana menjadi prioritas utama dalam melindungi nyawa dan aset di Asia dan Pasifik. Sehubungan dengan itu, kerja sama dalam penanggulangan bencana kini menjadi salah satu prioritas dalam kerja sama *East Asia Summit* (EAS). Komitmen negara-negara peserta EAS untuk meningkatkan kesiapsiaagaan di kawasan terhadap bencana dituangkan dalam *EAS Statement on Rapid Disaster Response* yang diadopsi pada KTT ke-9 Asia Timur (EAS) di Nay Pyi Taw, Myanmar tanggal 13 November 2014.

Sebagai tindak lanjut dari *EAS Statement on Rapid Disaster Response,* Australia bekerja sama dengan Thailand meyelenggarakan *EAS Rapid Disaster Response: Search and Rescue Lessons Learned Seminar* pada tanggal 21-23 September 2015 di Sydney, Australia. Seminar tersebut diadakan dengan tujuan untuk berbagi pengalaman dan *lessons learned* dalam koordinasi kegiatan SAR pada skala internasional termasuk kontribusi sipil dan militer dalam merespon suatu bencana.

Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI F.H. Bambang Sulistyo, S.Sos., M.A.P. Dalam kesempatan tersebut, Tim SAR Indonesia mendapatkan apresiasi dan diakui keunggulannya karena telah mampu menemukan pesawat Air Asia QZ 8501 secara cepat, hanya dalam waktu tiga hari sejak dinyatakan hilang kontak pada tanggal 28 Desember

DIT. KFA

Para peserta seminar *EAS Rapid Disaster Response: Search and Rescue Lessons Learned Seminar,* yang diselenggarakan pada tanggal 21-23 September 2015 di Sydney, Australia.

2014. Pencapaian tersebut bahkan dicatat sebagai sebuah prestasi yang luar biasa, dan Tim SAR Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terbaik di kawasan Asia.

Greg Waldron, editor majalah penerbangan Flight Global juga mengakui kehebatan Tim SAR Indonesia, sebagaimana dikutip dari Wall Street Journal, "Indonesia mempunyai banyak pengalaman menghadapi bencana, sehingga mereka memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam menginvestigasi berbagai kecelakaan." Menurutnya, Tim SAR Indonesia telah mampu menangani dengan baik berbagai kecelakaan walaupun menghadapi kondisi geografis yang sulit.

Kepala Basarnas menyampaikan bahwa kunci keberhasilan dari penanganan kasus Air Asia QZ 8501 adalah: kesatuan komando berdasarkan UU No.29 tahun 2014; kerja sama tim; proses pengambilan keputusan yang cepat; penanganan media dengan *one-gate policy information system*; komunikasi yang transparan terhadap keluarga korban; kepemimpinan yang kuat; dan proses yang mudah untuk bantuan internasional. Dari berbagai keberhasilan tersebut, *one command system* merupakan faktor penting keberhasilan penanganan kasus Air Asia QZ 8501. Sementara itu, tantangan yang dihadapi selama 77 hari penyelenggaraan operasi SAR yang dipimpin oleh Indonesia adalah: UU No.29 tahun 2014 mengenai pencarian dan pertolongan (SAR) belum tersosialisasikan dengan baik mengingat baru disahkan beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa tersebut; ego sektoral antar instansi masih terlihat; keterbatasan penguasaan bahasa asing; dan kondisi cuaca yang dinamis.

Selain menyampaikan pengalaman tentang kasus pesawat hilang Air Asia QZ 8501, Indonesia juga berbagi pengalaman mengenai Tsunami tahun 2004. Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan bahwa belajar dari bencana Tsunami tahun 2004, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana alam, antara lain melalui hukum perundang-undangan yang mengatur penanggulangan bencana dan koordinasinya; pembentukan badan koordinasi penanggulangan bencana; penanganan bantuan asing; peningkatan kerja sama regional, khususnya kapasitas ASEAN dalam merespon bencana yang terjadi di kawasan; peningkatan kapasitas SDM dan pemberian bantuan medis; serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana.

DIT. KFA

DIT. KFA

Suasana diskusi di seminar *EAS Rapid Disaster Response*. Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam koordinasi kegiatan SAR pada skala internasional.

Kapasitas Indonesia dalam SAR dan penanggulangan bencana merupakan modal bagi Indonesia untuk terus menunjukkan eksistensi dan kiprahnya di kancah internasional. Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kapasitasnya, baik dalam aspek sumber daya manusia maupun aspek peralatan dan teknologi, sehingga Indonesia dapat menjadi yang terdepan dalam kerja sama SAR dan penanggulangan bencana di tingkat regional. Sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas SAR, Indonesia mengusulkan perlunya meningkatkan kerja sama di tingkat regional melalui pembentukan *SAR Regional Standby Force*, pengembangan *Joint Standard Operating Procedure on the Regional SAR* dan pelaksanaan *SAR Exercise* yang rutin.

Seminar berhasil menyusun rekomendasi yang memfokuskan tiga aspek dalam penanggulangan bencana khususnya dalam operasi SAR, yaitu komunikasi, organisasi dan *capacity building*. Rekomendasi hasil Seminar tersebut telah disampaikan kepada *EAS Senior Officials Meeting* (SOM) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 9 Oktober 2015, untuk selanjutnya disampaikan kepada para pemimpin EAS, dan menjadi salah satu *outcome documents to be noted* pada KTT ke-10 Asia Timur (EAS) di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 22 November 2015.●

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

EAS STATEMENT ON ENHANCING REGIONAL MARITIME COOPERATION

KEPEMIMPINAN INDONESIA DI KAWASAN

CHINADAILY.COM.CN

Sebuah prakarsa Indonesia, yaitu *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* berhasil disahkan dalam *The 10th East Asia Summit*, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur Malaysia, 22 November 2015 lalu.

KTT ke-10 East Asia Summit (EAS) di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 22 November 2015 yang lalu mencatatkan sejarah penting bagi Indonesia. Sebuah prakarsa Indonesia, yaitu *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*, telah berhasil disahkan dalam KTT tersebut. Indonesia sekali lagi membuktikan peran aktif dan kepemimpinannya di kawasan, khususnya dalam konteks kerja sama kawasan di bidang maritim.

Sejak digulirkan pada tahun 2014, prakarsa Indonesia ini telah mengalami perkembangan signifikan. Pada saat itu, *EAS Statement* disepakati untuk dibahas lebih lanjut di antara negara peserta EAS. Dalam perkembangannya dan sesuai dengan prioritas nasional saat ini, Indonesia semakin meyakini bahwa kerja sama maritim di kawasan memiliki korelasi positif terhadap kesejahteraan di kawasan.

Kita tidak dapat memandang sebelah mata keterlibatan negara peserta EAS yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan 8 negara non-ASEAN, seperti Amerika Serikat dan RRT, dengan pengaruh di kawasan. Pengesahan prakarsa dimaksud merupakan bukti komitmen dan keseriusan negara peserta EAS untuk membuka diri, berdialog, dan yang lebih penting lagi, menjalin kerjasama di bidang maritim.

Sejauh ini, *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* dapat dipandang sebagai pernyataan politis di bidang kerja sama maritim yang paling komprehensif dalam konteks kepemimpinan ASEAN. Secara substansi, prakarsa tersebut tidak hanya terfokus pada aspek keamanan maritim, tetapi juga lima pilar dan kerja sama lainnya yaitu: Pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan, pemajuan perdamaian, stabilitas dan keamanan, upaya mengatasi berbagai tantangan lintas batas, konektivitas maritim, dan kerja sama antar lembaga penelitian.

Proses Pembahasan dan Negosiasi

Banyaknya perbedaan kepentingan yang seringkali bertolak belakang di antara negara peserta EAS

menjadikan proses pembahasan *EAS Statement* ini tidak berlangsung mudah. Indonesia selalu menekankan bahwa perbedaan yang ada harus diarahkan pada keyakinan bersama mengenai diperlukannya *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* untuk mewujudkan keamanan, kestabilan dan kesejahteraan bersama di kawasan.

Beberapa ketidak sepakatan yang muncul, antara lain mengenai cakupan wilayah, rekomendasi kerja sama maritim sebagai area prioritas baru dalam kerja sama EAS, elevasi *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) dengan menambahkan forum antar pemerintah (*track 1*) selain forum antar pemerintah dan sipil (*track 1,5*) yang sudah ada, maupun prinsip dan mekanisme penyelesaian sengketa di laut secara damai.

Indonesia tidak henti-hentinya melakukan *engagement* secara bilateral dan khusus dengan pihak yang menunjukkan resistensi terhadap prakarsa dan isi *draft EAS Statement*. Secara paralel, Indonesia juga melakukan konsultasi berkala dengan beberapa negara peserta EAS lainnya untuk terus mendapatkan dukungan. *Engagement* tersebut adalah bentuk nyata diplomasi yang secara khusus dan intensif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN melalui Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan beserta tim yang didukung Dit. Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan dan Dit. Politik dan Keamanan ASEAN dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

PORTSTRATEGY.COM

Kerja sama di bidang maritim, antara lain meliputi kerjasama keamanan maritim, pembangunan ekonomi maritim, dan konektivitas maritim antar negara ASEAN.

Semakin berlarutnya negosiasi dan pembahasan serta mempertimbangkan mendesaknya waktu sebelum pelaksanaan rangkaian KTT ke-27 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya di Kuala Lumpur tanggal 18-22 November 2015, mendorong Indonesia mensirkulasikan sebuah *final draft text* per 17 November 2015 kepada seluruh negara peserta EAS. Indonesia juga berupaya untuk menemukan jalan tengah atas perbedaan yang ada.

Final draft text yang disirkulasikan Indonesia di Kuala Lumpur pada umumnya mendapatkan reaksi positif. Negara peserta EAS mendukung agar *final draft text* tersebut dapat segera diajukan ke KTT ke-10 EAS untuk disahkan. Sementara itu, beberapa negara peserta EAS lain masih meminta untuk menambahkan kembali ataupun menghilangkan beberapa hal yang masih menjadi *concern* bersama. Dinamika pembahasan memuncak selama pelaksanaan rangkaian KTT ke-27 ASEAN dan KTT terkait lainnya di Kuala Lumpur. Puluhan pertemuan bilateral antara Indonesia dan beberapa pihak terkait dilakukan secara intensif untuk mencapai kesepakatan yang bisa diterima semua pihak.

Hasil Akhir dan Tindak Lanjut

Akhirnya, setelah proses negosiasi yang alot, *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* sebagai prakarsa Indonesia berhasil disahkan oleh para Pemimpin EAS pada saat KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur tanggal 22 November 2015. RRT bahkan secara terbuka sejak awal menyatakan keinginannya menjadi *Co-Sponsors*, disusul oleh Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat.

Upaya Indonesia selaku pemrakarsa *EAS Statement* secara khusus juga mendapat apresiasi dari Presiden AS Barack Obama. Bagi Obama, prakarsa ini merupakan suatu terobosan dalam konteks kerjasama EAS di bidang maritim yang memiliki arti penting dan manfaat bagi kawasan. Mayoritas negara peserta EAS juga menunjukkan kepuasan sekaligus menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia atas keberhasilan pengesahan *EAS Statement* ini. Penghargaan ini terutama dikarenakan proses panjang dan tidak mudah yang harus ditempuh sejak tahun 2014 agar *statement* tersebut dapat disepakati oleh semua pihak.

Setelah disahkannya *EAS Statement* ini, tantangan berikutnya bagi Indonesia adalah bagaimana mengimplementasikan butir-butir penting dalam *statement* dimaksud agar sesuai dengan harapan, tujuan dan manfaat bagi kepentingan nasional. Untuk itu, Indonesia perlu mendorong para pemangku kepentingan untuk dapat bekerja sama mengimplementasikan secara nyata rekomendasi-rekomendasi dalam *EAS Statement* agar momentum yang telah ada tetap dapat terjaga. •

DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

KTT *ASEAN PLUS ONE*: MITRA WICARA DUKUNG PEMBENTUKAN MASYARAKAT ASEAN

ASEAN.ORG

Suasana KTT ASEAN-AS, salah satu bentuk kerja sama eksternal ASEAN dengan negara mitra wicara yang disebut juga *ASEAN Plus One.* KTT *ASEAN Plus One* kali ini merupakan yang terakhir, sebelum berlakunya Masyarakat ASEAN.

Transformasi ASEAN menjadi sebuah komunitas diteguhkan dengan pengesahan dokumen *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* pada rangkaian KTT ke-27 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya di Kuala Lumpur, 18-22 November 2015. Visi Masyarakat ASEAN 2025, yang meliputi *ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC),* berhasil disahkan sebagai panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan.

Dalam sambutan pembukaan KTT ke-27 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre, Perdana Menteri Malaysia selaku Ketua ASEAN 2015, menyadari bahwa pencapaian Visi Masyarakat ASEAN 2025 merupakan sebuah keinginan yang ambisius. Namun, sikap dan pandangan positif seperti yang ditularkan para pendiri ASEAN inilah yang ingin dicontoh demi tercapainya pembangunan kawasan yang stabil, aman, damai dan sejahtera.

Sebagai sebuah organisasi yang bersifat *outward looking*, ASEAN telah menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai Mitra Wicara sejak tahun 1974. KTT ASEAN dengan Mitra Wicara di paruh kedua setiap tahunnya, menjadi forum diskusi bagi para kepala negara/pemerintahan negara anggota ASEAN dengan Mitra Wicara untuk membahas arah ke depan kerja sama kemitraan serta berbagai isu aktual di tingkat global.

KTT kali ini menjadi istimewa karena merupakan KTT terakhir sebelum ASEAN memasuki periode baru dalam perjalanan panjangnya sebagai sebuah organisasi regional, yaitu Masyarakat ASEAN 2015. KTT *ASEAN Plus One* menjadi forum diteguhkannya kembali dukungan seluruh Mitra Wicara atas terintegrasinya ASEAN sebagai sebuah komunitas.

KTT ke-18 ASEAN-RRT

ASEAN.ORG

Kerja sama kemitraan strategis ASEAN-RRT berbuah manis dengan ditandatanganinya berbagai kesepakatan baru pada KTT ke-18 ASEAN-RRT di Kuala Lumpur, Malaysia, 21 November 2015. Kesepakatan tersebut diantaranya *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-China Strategic Partnership for Peace and*

Prosperity 2016-2020, disepakatinya tahun 2016 sebagai "*ASEAN-China Education Exchange Year*" serta dicanangkannya KTT Peringatan 25 Tahun Kemitraan Strategis ASEAN-RRT pada tahun 2016.

Di bidang ekonomi, telah ditandatangani *Protocol to Amend the Framework Agreement on the Comprehensive Economic Cooperation and Certain Agreements thereunder*, yang antara lain mendorong realisasi target pencapaian perdagangan dua arah ASEAN-RRT sebesar USD 1 triliun dan target total investasi sebesar USD 150 miliar pada tahun 2020. Adapun terkait isu Laut Tiongkok Selatan (LTS), ASEAN mengharapkan RRT menghentikan tindakan-tindakan yang dapat memicu ketegangan di LTS serta mematuhi hukum internasional dan kebebasan bernavigasi serta *overflight*.

KTT ke-18 ASEAN-Jepang

REUTERS

Pada KTT ASEAN-Jepang kali ini, para Kepala Negara/Pemerintahan negara anggota ASEAN mengapresiasi bantuan Jepang dalam proses integrasi kawasan, khususnya dalam bidang konektivitas, melalui berbagai mekanisme dan inisiatif Jepang. ASEAN juga menggaris bawahi bahwa pengurangan kesenjangan pembangunan merupakan salah satu prioritas saat ini. ASEAN-Jepang dalam pertemuan ini juga membahas isu terorisme, kejahatan lintas negara, dan *organized crime* dan berharap adanya kerja sama lanjutan untuk memastikan keamanan dan kemakmuran di kawasan. Dalam konteks LTS, pertemuan meyakini Jepang sebagai salah satu pihak utama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.

KTT ke-17 ASEAN-Republik Korea

FLICKR.COM

Berkat peran aktif Indonesia sebagai *Country Coordinator* kerja sama kemitraan ASEAN-Republic of Korea (ROK) periode 2012-2015, dalam pertemuan ini telah disahkan *ASEAN-ROK Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperity 2016-2020* sebagai kerangka kerja sama kemitraan kedua belah pihak selama lima tahun ke depan. Selain itu, di dalam pertemuan yang sama, telah diselesaikan pula pembahasan *Third Protocol to Amend the ASEAN-ROK Trade in Goods Agreement (Third Protocol)*, pembentukan *ASEAN-ROK innovation centre* dan pertemuan kedua *ASEAN-ROK Business Council* (AKBC). Berbagai kerja sama yang telah terbentuk antara ASEAN-ROK bertujuan untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga mampu bersaing di pasar global serta meningkatkan perdagangan dan investasi.

KTT Peringatan 40 tahun ASEAN-Selandia Baru

ISTIMEWA

Para pemimpin ASEAN menegaskan pentingnya dukungan Selandia Baru sebagai mitra strategis ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat ASEAN 2015, Visi Masyarakat ASEAN 2025, dan mendorong tersedianya peluang kerjasama untuk masa depan ASEAN-Selandia Baru. Pertemuan juga merasakan pentingnya pemanfaatan kerja sama kemitraan melalui implementasi *Plan of Action to Implement the Joint Statement for ASEAN-New Zealand Strategic Partnership (2016-2020)* terutama kerjasama di bidang perdagangan dan investasi, pariwisata, UMKM, penanggulangan bencana, pertanian dan ketahanan pangan. Peningkatan kerja sama pendidikan dan *people-to-people connectivity* melalui pemberian beasiswa, pertukaran pelajar, serta pelatihan bahasa Inggris di negara anggota ASEAN juga menjadi salah satu fokus kesepakatan dalam KTT di Kuala Lumpur pada tanggal 22 November 2015 lalu.

KTT ke-13 ASEAN-India

ASEAN.ORG

Pada KTT ke-13 ASEAN-India di Kuala Lumpur tanggal 21 November 2015, ASEAN menyambut baik perubahan kebijakan Pemerintah India dari sebelumnya "*Look East Policy*" menjadi "*Act East Policy*" yang dipandang akan berdampak positif terhadap kemitraan strategis ASEAN-India. Nilai penting ASEAN bagi India diterjemahkan dengan mendukung proses pembentukan Masyarakat ASEAN serta mendukung sentralitas dan kepemimpinan ASEAN. Bertambahnya intensitas kerja sama kemitraan ASEAN-India juga ditandai dengan proses pembentukan *ASEAN-India Centre* (AIC). AIC diharapkan memiliki peran signifikan dengan memberikan

rekomendasi di berbagai sektor bagi peningkatan kerjasama kemitraan ASEAN-India ke depannya. Selain itu, dukungan India, khususnya dalam proyek pembangunan infrastruktur yang menghubungkan India, Myanmar, dan Thailand, juga memiliki makna penting dalam meningkatkan kerjasama di bidang konektivitas ASEAN-India.

KTT ke-3 ASEAN-Amerika Serikat

KEMENDAG.GO.ID

KTT ke-3 ASEAN-AS kali ini memiliki arti penting dengan adanya pencapaian baru dalam hubungan ASEAN-AS sejak berdiri pada tahun 1977. KTT telah mengesahkan peningkatan hubungan ASEAN-AS menjadi kemitraan strategis melalui pengesahan *Joint Statement on the ASEAN-US Strategic Partnership serta Plan of Action to Implement the ASEAN-US Strategic Partnership (2016-2020)* sebagai panduan program kerja sama kemitraan ASEAN-AS untuk lima tahun ke depan. Beberapa isu yang mengemuka pada pertemuan kali ini antara lain terkait upaya bersama penyelesaian isu Laut Tiongkok Selatan (LTS), kesepakatan baru di Paris dalam mengatasi isu perubahan iklim, isu kontra terorisme, *wildlife trafficking*, *trafficking in persons*, dan *cyber-crime*.

KTT ke-18 *ASEAN Plus Three* (APT)

Pertemuan membahas pentingnya intensifikasi implementasi area kerja sama dalam kerangka APT, seperti konektivitas dan upaya mempersempit kesenjangan pembangunan; penguatan *Chiang Mai Initiative Multilateralisation* (CMIM) sebagai regional *financial safety net* untuk menjaga stabilitas matauangdi kawasan; dan signifikansi *APT Macroeconomic Research Office*

KSP.GO.ID

(AMRO) untuk memonitor dan menganalisa kondisi makro ekonomi regional. Para pemimpin ketiga belas negara APT juga menggarisbawahi pentingnya implementasi *APT Bioenergy and Food Security Framework 2015-2025* untuk mendukung upaya menjaga ketahanan dan keamanan pangan, termasuk dalam kerangka *APT Emergency Rice Reserves* (APTERR); mengembangkan sumber daya bioenergi yang ramah lingkungan; serta perlunya implementasi nyata dari *Work Plan on Enhancing APT Cooperation through Information and Media* (2012-2017) untuk memastikan kelancaran arus informasi mengenai ASEAN dan APT.

KTT ke-10 Asia Timur

ASEAN.ORG

Tahun 2015 bermakna penting bagi *East Asia Summit (EAS)* karena bertepatan dengan perayaan 10 tahun berdirinya KTT Asia Timur yang ditegaskan dengan pengesahan *Kuala Lumpur Declaration on the Tenth Anniversary of the EAS*. Bagi Indonesia, KTT ke-10 Asia Timur kali ini menandai keberhasilan Indonesia dalam menyukseskan pengesahan *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* yang diprakarsai oleh Indonesia dengan RRT, Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat sebagai *co-sponsors*. Pertemuan memandang signifikansi kerja sama maritim bagi upaya menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan. Pertemuan juga mencatat usulan untuk menjadikan kerja sama maritim sebagai salah satu area prioritas kerja sama EAS.

Isu-isu lain yang juga mendapat perhatian dalam KTT ke-10 Asia Timur di Kuala Lumpur tanggal 22 November 2015 adalah upaya denuklirisasi di kawasan melalui *Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ); penggunaan teknologi komunikasi dan informasi serta pengesahan *EAS Statement on Issues related to Security of and in the Use of ICTs* (prakarsa AS); serta peningkatan kerja sama pencegahan terorisme dengan menciptakan masyarakat yang toleran, saling menghargai dan mencegah radikalisasi.

KTT ke-7 ASEAN-PBB

ASEAN.ORG

KTT ke-7 ASEAN-PBB mendorong penguatan kerja sama di bidang perubahan iklim, khususnya melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana serta mendukung kesuksesan Konferensi Perubahan Iklim di Paris pada Desember 2015. Disepakati pula pentingnya kerja sama perlindungan HAM, terutama wanita dan anak-anak, sesuai dengan *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children*. Keberhasilan pengesahan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan *Sustainable Development Goals 2030* yang saling melengkapi juga mendapat apresiasi dan dukungan untuk segera diimplementasikan. •

DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

ISTIMEWA

6TH ASEAN MARITIME FORUM & 4TH EXPANDED ASEAN MARITIME FORUM

WUJUD DIPLOMASI MARITIM RI

Dewasa ini isu maritim merupakan isu yang bersifat strategis bagi ASEAN. Untuk itu, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan The 6th *ASEAN Maritime Forum* dan *The 4th Expanded ASEAN Maritime Forum* di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 8-11 September 2015, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai isu maritim regional yang menjadi perhatian bersama serta mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi dan yang berpotensi menjadi tantangan di kawasan ASEAN.

Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam kerangka kerjasama ASEAN di bidang ekonomi mengingat potensi produksinya yang besar, dengan pertumbuhan 3,3 % selama periode 5 tahun terakhir, dan berkontribusi sebesar 21,7% dari total produksi dunia. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar negara ASEAN untuk dapat membudidayakan kekayaan laut secara harmonis.

Komitmen Indonesia dalam menggelar pertemuan ini sejalan dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan juga sebagai bentuk implementasi diplomasi Indonesia di tingkat regional dan Internasional untuk memperjuangkan kepentingan di bidang kemaritiman.

Tujuan AMF adalah untuk mendorong kerjasama melalui dialog dan konsultasi terkait isu maritim yang menjadi kepentingan bersama dan melakukan kajian terhadap kebijakan mengenai masalah kelautan di kawasan, serta mendorong pengembangan kapasistas, pelatihan, dan kerja sama teknis terkait keamanan maritim dan perlindungan lingkungan. *Asean Maritme Forum* ke-6 membahas berbagai isu maritim yang berkembang di kawasan ASEAN, antara lain, pengembangan pengaturan regional dalam perlindungan sumber daya hayati kelautan dan penguatan kerja sama maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Sementara dalam *The 4th Expanded ASEAN Maritim Forum* yang dipimpin oleh Indonesia, para delegasi ASEAN + Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat mendiskusikan permasalahan maritim dengan berbagai pandangan mengenai isu-isu maritim lintas negara yang memiliki arti strategis bagi perdagangan, keamanan regional dan internasional, keterjagaan sumber daya laut, navigasi laut dan *passages*. Pertemuan juga membahas mengenai pengembangan pengaturan regional dalam perlindungan sumber daya hayati kelautan dan tantangan keamanan maritim regional. Kedua pertemuan juga mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat institusi AMF dan EAMF ke depan.

Pertemuan ini tidak hanya membawa kepentingan ASEAN, tetapi juga kepentingan Manado sebagai tuan rumah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan forum ini dapat ditemukan solusi bagi pengembangan pengaturan regional dalam perlindungansumber daya hayati kelautan dan memajukan *Coral Triangle Initiative* (CTI) sebagai salah satu bentuk kerja sama maritim yang dibentuk pada tahun 2007 untuk menghadapi ancaman terhadap sumber daya laut terutama *coral reefs*, mengingat Indonesia menjadi sekretariat CTI. Forum ini juga di manfaatkan Manado dalam mempromosikan pariwisata laut Sulawesi Utara. ●

DIT. POLKAM ASEAN

ELNUSA NEWS

Para peserta *The 6th ASEAN Maritime Forum dan The 4th Expanded ASEAN Maritime Forum* di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 8-11 September 2015.

GLOBOTOURS.NET

Pnom Penh ibukota Kamboja, pada dasarnya, negara ini tidak menerapkan prosedur yang rumit dalam menerbitkan perijinan impor.

KEBIJAKAN PERDAGANGAN KAMBOJA

Kebijakan Tarif (*Applied Tariff*)

Sesuai visi yang diusung oleh negara anggota ASEAN untuk mewujudkan integrasi ekonomi, masing-masing negara sepakat dan tengah berupaya untuk mengatasi hambatan peredaran/aliran barang dan jasa didalam negara kasawan regional ASEAN. Bersama dengan negara ASEAN lainnya, Kamboja menandatangani skema *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dalam kerangka *ASEAN Free Trade Area* (FTA).

Skema ini memungkinkan adanya pengurangan *tariff* hingga 0-5% bagi produk-produk negara anggota ASEAN selama 10 tahun terhitung 1 Januarai 2000. Besaran *tariff* yang ditentukan oleh skema ini adalah kurang dari setengah dari *tariff* MFN untuk produk pertanian dan sepertiga untuk produk non-pertanian. Kamboja juga sepakat untuk mengeliminasi *tariff* bagi seluruh produk negara ASEAN di tahun 2015, kecuali untuk 7% *tariff lines* – produk yang didefinisikan secara detil untuk pengaturan bea masuk di mana tarif tersebut baru akan dihapus pada akhir tahun 2017. Untuk yang berada dalam *Sensitive List*, *tariff* maksimum akan ditetapkan sebesar 5% pada tahun 2018.

Sistem dan Prosedur Perijinan Impor

Pada dasarnya, Kamboja tidak menerapkan prosedur yang rumit dalam menerbitkan perijinan impor, bahkan dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh *General Department of Custom and Excises of Cambodia* (GDCE), lisensi/ijin impor dari perusahaan eksportir tidak diperlukan.

Namum, terdapat beberapa aturan yang harus diikuti dalam mengimpor barang ke Kamboja, terdapat dua prosedur impor barang yang ditentukan oleh Kamboja menurut tempat diterimanya barang. Pertama, pelabuhan. Setelah sampai di pelabuhan, seluruh dokumen mengenai barang impor harus diperlihatkan kepada GDCE. Proses ini dinamakan deklarasi.

Dokumen-dokumen yang perlu diperlihatkan dalam *Commercial Invoice, Packing list, Proforma Invoice, Bill of lading, airways bill* atau dokumen serupa lainnya, dan *import Declaration Form* yang diisi setelah barang sampai di pelabuhan. Proses ini berlaku tidak hanya untuk impor tetapi juga ekspor dan memerlukan biaya sebesar USD 40.

Prosedur tersebut memiliki perbedaan jika barang sampai di bandara. Setelah barang sampai di bandara, maka importir harus menunjukkan seluruh dokumen pendukung seperti yang disebutkan pada prosedur pelabuhan, kepada petugas GDCE. Kemudian, petugas akan melakukan penilaian dan importir membayar pajak dan bea cukai sesuai

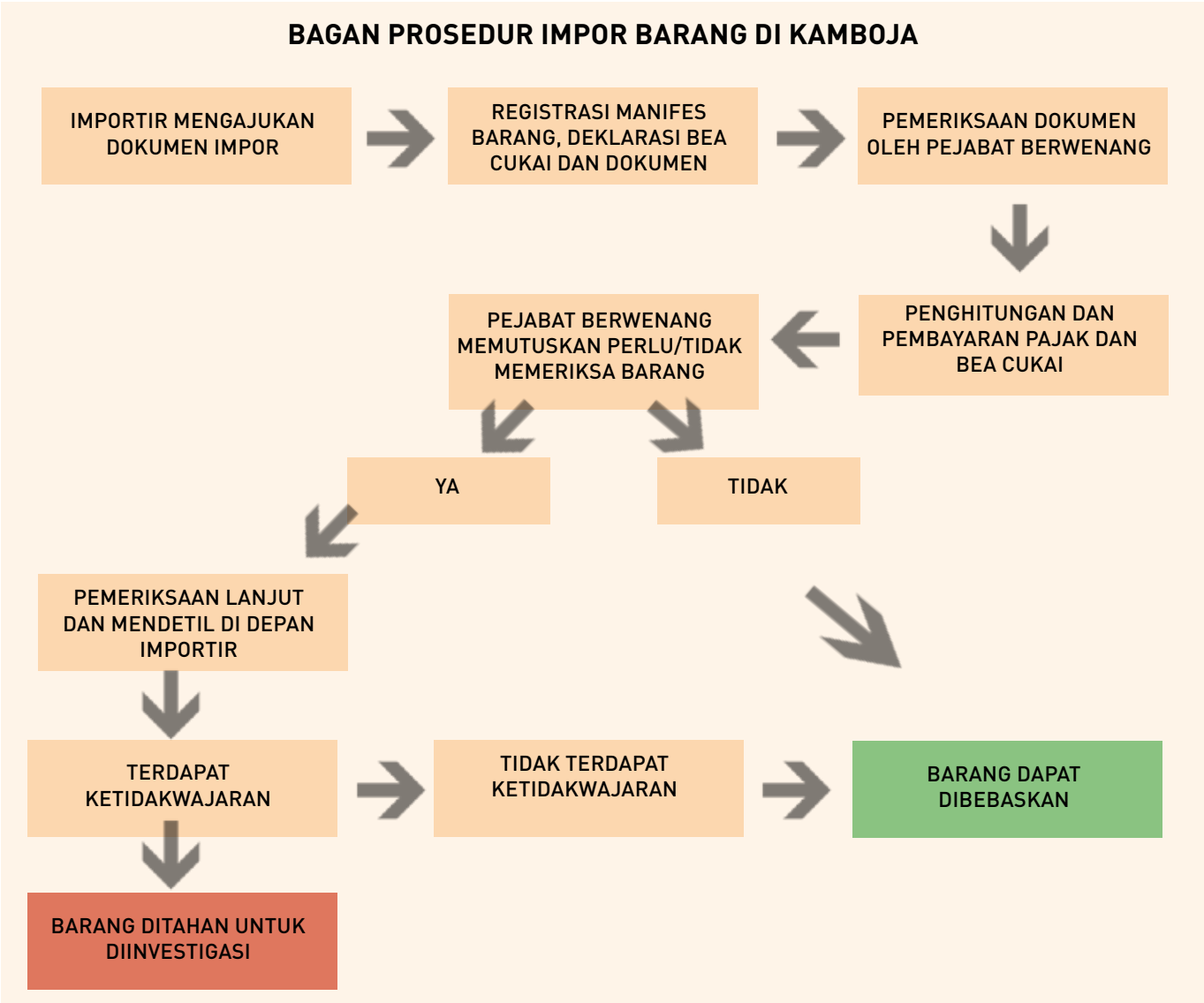

dengan ketentuan pemeritnah Kamboja. Setelah penilaian dan pembayaran dilakukan, maka *entry declaration* dapat didaftarkan. Dokumen-dokumen tersebut kemudian akan diberikan kepada pejabat yang berwenang dan barang dapat dibebaskan.

Kebijakan Pembatasan atau Pelarangan Impor (*Impor Restriction or Prohibition*)

Pada dasarnya, Kamboja melarang impor beberapa jenis barang yang termasuk dalam golongan narkotika, psikotropika dan turunannya, limbah beracun dan barang kimia beracun termasuk turunannya, dan pestisida. Dalam rangka pencegahannya wabah *avian influenza*, Kamboja juga sempat melakukan pelarangan impor produk unggas.

Selain itu, beberapa produk juga mengalami pembatasan impor dalam bentuk *non-automatic licensing*. Produk tersebut antara lain impor produk farmasi yang memerlukan ijin dari Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, impor produk senjata, bahan peledak dan amunisi memerlukan ijin dari Kementerian Pertahanan, dan impor batu/logam mulia memerlukan ijin dari Bank Sentral Kamboja.

Ketentuan mengenai daftar barang impor yang dibatasi atau dilarang tersebut dituangkan dalam S*ub Decree No. 209ANK.BK on Enforcement of the List of Probihited Goods and Restrictred Goods* yang didukung oleh peraturan pendukung *Annex 1* dan *Annex 2 of the Sub Decree 209 on Enforcement of the List of Probihited Goods and Restricted Goods*. Daftar barang tersebut merupakan ketetapan dari pemerintah Kamboja yang disesuaikan dengan ketentuan dari pasal 8 Undang-undang tentang Kapebenan yang diterbitkan berdasarkan *Royal Decree* No.NS/RKM/0707/017 tertanggal 20 Juli 2007.

Pada prinsipnya, barang-barang yang termasuk dalam daftar tersebut adalah barang yang tidak hanya impor tetapi juga ekspornya tunduk pada ketentuan tertentu untuk berbagai tujuan seperti, perlindungan keamanan nasional, perlindungan hajat hidup dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, perlindungan terhadap ketertiban umum dan moralitas, serta

YOURPNOMPENH.COM

Kesibukan di Orussey Market, salah satu pasar tradisional besar di Pnom Penh, Kamboja.

ketaatan pada hukum yang telah ditetapkan di Kamboja.

Standar Kesehatan (*Sanitary and Phytosanitary*)

Sebagai upaya mengimplementasikan SPS, pemerintah Kamboja menerbitkan peraturan *Sub-decree* yang mengatur *Establishment of an Inter-Ministerial Commitee Coordinating Inspection of Quality and Safety of Products and Services* (IMCCIQSPS). Selain itu, melalui *Law on the Management of Quality and Safety Products and Services* (LMQSPS) memberikan wewenang kepada *Camcontrol* untuk melakukan tes bagi produk makanan dan minuman yang akan diimpor, diekspor maupun produk lokal yang akan dipasarkan di dalam negeri.

Kementerian Pertanian, Kehutan dan Perikanan bertanggung jawab untuk memeriksa kesehatan hewan, tumbuhan dan perikanan. *Department of Animal Health and Production* (DAHP) bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan atas hewan dan produk hewan yang akan keluar dari Kamboja serta menerbitkan *Animal Health Certificate*. Sementara *Department of Agronomy and Agricultural Land inprovment* (DAALI) bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat *phytosanitary* dan *Department of Fisheries/Fisheries Adminitration* (FIA) bertanggung jawab atas penerbitan ijin ekspor dan impor produk perikanan.

Kementerian Kesehatan melalui *Food Safety Bureau* (FSB) bertanggung jawab dalam masalah keamanan produk makanan dan kesehatan publik. Selain itu, *Institute of Standards of Cambodia* (ISC) telah menerbitkan sedikitnya 14 standar yang berkaitan dengan *food hygiene* dan produk makanan, 4 standar yang berkaitan dengan kualitas dan sistem manajemen lingkungan, di samping sedikitnya 14 *draft* standar produk makanan lainnya.

Standar Teknis (*Technical Standard*)

Law on Standard of Cambodia tahun 2007 menjadi dasar hukum ketentuan yang berkaitan dengan aturan standar teknis. Undang-undang tahun 2007 tersebut mencakup standar teknis seluruh produk industri dan pertanian, kecuali hal-hal yang sudah tercakup dalam aturan SPS.

Institute of Standards of Cambodia (ISC) bertanggung jawab dalam menentukan standar dan sertifikasi produk sementara Kementerian Perdagangan bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan awal terhadap produk yang memenuhi standar.

Tidak semua barang impor membutuhkan sertifikasi standar teknis mutu barang. Namun semua importir harus memiliki sertifikasi atau lisensi sebelum mengimpor suatu barang. Saat ini lembaga sertifikasi Kamboja, ISC belum melakukan pengawasan yang ketat terhadap sertifikasi barang baik impor maupun ekspor.

Labelisasi bukan suatu keharusan bagi barang impor. Namun demikian, semua produk impor harus memiliki sertifikasi label dan didaftarkan pada Kementerian terkait sebelum dilakukan proses impor. Label untuk produk yang berbeda diatur dan didaftarkan pada Kementerian yang berbeda pula.

Tidak seperti peraturan di negara lain, *Law on Mark, Trade Names and Acts of Unfair Competition* tahun 2002 dan *Sub-decree on its implementation* tahun 2006 tidak menjelaskan secara detail mengenai ketentuan merek dagang. Secara umum, pengajuan setiap merek dagang hanya berlaku untuk satu jenis.

Proses pengajuan merek dagang biasanya memakan waktu 4-5 bulan terhitung dari pengajuan aplikasi hingga keluarnya sertifikasi merek dagang. Perlindungan merek dagang berlaku hingga 10 tahun. Pemegang merek dagang hanya bisa menggunakan mereknya di Kamboja.

Subsidi untuk Produk Industri

Dalam rangka menarik investasi asing, Pemerintah Kamboja telah menerbitkan Undang-undang investasi pada tahun 1994 yang mengatur antara lain insentif bagi para investor.

Bentuk insentif yang diberikan antara lain adalah pembebasan pajak impor dan VAT bagi proyek-proyek investasi yang menghasilkan produk ekspor, termasuk bagi perusahaan yang menghasilkan produk barang baku bagi industri garmen dan alas kaki. •

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

KIAT NEGARA ANGGOTA ASEAN MENYONGSONG MASYARAKAT ASEAN

SQUARESPACE.COM

Masyarakat ASEAN telah tiba pada tanggal 31 Desember 2015, sebagai kesepakatan para pemimpin ASEAN. Sejak digulirkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal ke-2 di Kuala Lumpur, 15 Desember 1997, hingga dikukuhkan pada KTT ke-27 di Kuala Lumpur, 21 Desember 2015, melalui penandatanganan 2015 Kuala Lumpur *Declaration on the Establishment of the ASEAN Community*.

Hingga Desember 2015 diketahui tingkat implementasi Cetak Biru ASEAN 2015 telah mencapai 97,6%, dengan rincian sebagai berikut: (a) pilar Masyarakat Politik Keamanan ASEAN sebesar 100%; (b) pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN 92,7%, dan (c) pilar Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN sebesar 100,0%. Implementasi Rencana Aksi dalam kerangka pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang belum terimplementasi akan diprioritaskan di dalam agenda pasca 2015 untuk diselesaikan sebelum tahun 2016 berakhir.

Tingginya tingkat implementasi Cetak Biru ASEAN 2015 sejatinya mencerminkan komitmen semua negara anggota ASEAN memasuki era baru kerja sama di kawasan Asia Tenggara. Hal menarik adalah mengetahui sejauh mana negara-negara tetangga mempersiapkan diri menyambut Masyarakat ASEAN. Untuk itu, sejumlah tim dari Sekretariat Ditjen Kerja Sama ASEAN secara terpisah melakukan *benchmarking* ke Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam antara 2014–2015.

Tujuan *benchmarking* adalah mengetahui secara langsung langkah kebijakan di negara-negara tersebut sebagai studi komparatif. Pada kunjungan-kunjungan itu, tim bertemu pihak terkait setempat seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah, dunia usaha dan perguruan tinggi.

Secara garis besar ada tiga hal yang diangkat kepada para pemangku kepentingan tersebut, yakni menyangkut kelembagaan, kebijakan menghadapi Masyarakat ASEAN dan strategi pemasyarakatan.

Terkait kelembagaan, keberadaan Sekretariat Nasional ASEAN masing-masing negara berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri yang melakukan koordinasi melalui pertemuan-pertemuan berkala. Di luar itu, Filipina dan Laos membentuk badan dalam kerangka kerja sama regional yakni masing-masing *Philippines Council for Regional Cooperation* (PCRC) dan *Lao National Committee for the ASEAN Integration*.

Kebijakan yang diambil negara-negara tersebut menghadapi Masyarakat ASEAN secara umum memiliki kesamaan seperti percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan daya saing kalangan dunia usaha termasuk Usaha Kecil Menengah, pengembangan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efektifitas dan koordinasi antara lembaga Pemerintah baik pada tingkat Pusat maupun tingkat daerah.

SURBANA.COM

Gambar *masterplan* pelabuhan di Pulau Muara Besar, Brunei Darussalam. Salah satu kiat untuk memanfaatkan peluang Masyarakat ASEAN, Brunei ingin menjadi *hub* dan *transshipment* bagi ASEAN.

Sebagai contoh, Pemerintah Filipina memiliki strategi 4C (*the Philippines Game Plan*), yakni peningkatan daya saing (*Competitiveness*) melalui pembuatan kebijakan dan Undang-undang yang mendukung iklim usaha, pengembangan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur serta peningkatan perdagangan dan investasi; pemenuhan kewajiban dan komitmen Filipina di ASEAN (*Compliance*) melalui implementasi Cetak Biru MEA secara penuh dengan mereformasi dan harmonisasi kebijakan serta regulasi nasional; penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait (*Collaboration)* melalui sinergi dan koordinasi; dan intensifikasi komunikasi untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai MEA (*Communication*).

Integrasi kawasan dalam Masyarakat ASEAN pada gilirannya akan dirasakan oleh penduduk di 10 negara anggota ASEAN, sehingga mengharuskan pemerintah masing-masing aktif melakukan pemasyarakatan. Strategi pemasyarakatan yang dilakukan setiap negara memiliki ciri khas masing-masing, dengan sasaran peningkatan kesadaran warga negara mengenai peluang dan tantangan pada Masyarakat ASEAN. Pemasyarakatan tidak saja dilakukan melalui media elektronik, khususnya televisi, tetapi lewat lembaga pendidikan. Sebagai contoh stasiun televisi Kamboja membuat acara *ASEAN Television News, ASEAN in Action, ASEAN Quiz* dan *ASEAN Seminar Series*. Demikian pula dengan televisi nasional Vietnam menyediakan *slot* waktu khusus untuk menayangkan program mengenai ASEAN dan negara anggota ASEAN. Sementara itu, pemerintah Laos memasukkan pelajaran mengenai ASEAN ke dalam kurikulum di SMA dan perguruan tinggi.

Kiat Brunei lain lagi. Meski telah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dari industri minyak dan gas, negeri ini tidak ingin ketinggalan memanfaatkan MEA. Bermodalkan letaknya yang berada di tengah kawasan ASEAN, Brunei ingin menjadi *hub* perdagangan dan *transshipment*. Brunei pun mengundang investasi asing di sektor non-migas seperti *life sciences* (farmasi, kosmetik, dll), agribisnis (*food processing*); teknologi informasi dan komunikasi; dan jasa (logistik, perawatan pesawat, dan galangan kapal). Brunei ingin mencapai Wawasan (visi) Brunei 2035 antara lain mencapai perekonomian yang dinamis dan berkelanjutan dengan pendapatan per kapita 10 besar dunia.

Lain halnya dengan Singapura Secara prinsip, negara ini tidak memiliki strategi nasional yang khusus ditujukan untuk menghadapi Masyarakat ASEAN. Namun, pemerintah Singapura senantiasa meningkatkan kualitas SDM warga negaranya, serta kapasitas institusional lembaga dan perusahaan nasionalnya, untuk menangkap peluang Masyarakat ASEAN. Pemerintah Singapura juga secara konsisten berupaya mewujudkan Singapura sebagai *the global and attractive city*. Salah satu hal yang patut dicontoh oleh Indonesia adalah upaya Kementerian Pendidikan Singapura dalam memanfaatkan momen HUT ASEAN setiap tanggal 8 Agustus untuk memperkenalkan ASEAN ke sekolah-sekolah dasar dan menengah, baik swasta maupun milik pemerintah, di Singapura. •

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

ASEAN FRIENDSHIP GATHERING

Guna menyamakan langkah menyambut Masyarakat ASEAN yang diresmikan pada 31 Desember 2015, Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat ASEAN mengadakan perhelatan akbar, *ASEAN Friendship Gathering*, pada 23 Desember 2015. Suasana persahabatan dari ratusan tamu yang hadir di acara tersebut sangat terasa memenuhi atmosfir Ruang Lobi Utama Gedung Sekretariat ASEAN.

Hal itu tampak dari keakraban para wakil dari komunitas diplomatik, kementerian dan lembaga, unsur DPR RI dan DPRD Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pusat Studi ASEAN (PSA), dan wakil organisasi masyarakat.

Kehadiran Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir – mewakili Menteri Luar Negeri RI – sebagai *guest of honor*, semakin menambah kesan yang mendalam pada acara persahabatan tersebut. Memanfaatkan momentum acara, telah diumumkan hasil Sayembara Konsep Desain Gedung Baru Sekretariat ASEAN, yang berhadiah ratusan juta rupiah. Juara pertama disabet oleh Hengky Pramudya dan rekan yang menggondol hadiah uang tunai sebesar Rp 500 juta. Pembangunan gedung baru Sekretariat ASEAN akan dimulai tahun 2016

Semangat dan rasa kekitaan ASEAN semakin terasa di lobi Gedung Sekretariat ASEAN dengan suguhan beranekaragam kuliner masing-masing negara anggota ASEAN dan beberapa negara mitra wicara. Penampilan berbagai wakil negara di Sekretariat ASEAN yang membawakan lagu dari daerah masing-masing, semakin memeriahkan acara persahabatan tersebut.

Berikut ini kami tampilkan beberapa gambar yang kami rekam dari momen keakraban ASEAN Friendship Gathering itu. •

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Sekjen ASEAN Le Luong Minh, Wamenlu A.M. Fachir, dan Dirjen Kerja Sama ASEAN I Gusti Agung Wesaka Puja, berbincang di tengah berlangsungnya acara *ASEAN Friendship Gathering.*

FOTO-FOTO: SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Para tamu yang menghadiri acara *ASEAN Friendship Gathering* mendengarkan *ASEAN Anthem.*

Wamenlu A.M. Fachir menyampaikan sambutan pada acara *ASEAN Friendship Gathering.*

Sekjen ASEAN Le Luong Minh, ketika menyampaikan sambutan di dalam acara *ASEAN Friendship Gathering.*

Penyerahan hadiah senilai Rp 500 juta kepada Pemenang Pertama Sayembara Design Gedung *ASEAN Secretary*.

Peninjauan maket gedung *ASEAN Secretary* yang baru.

Beberapa tamu undangan tengah menikmati hidangan.

Suasana keakraban para tamu undangan di tengah berlangsungnya acara.

Para tamu undangan menari Poco-poco bersama.

Beberapa tamu undangan bernyanyi bersama memeriahkan acara.

Wamenlu A.M. Fachir berfoto bersama anggota *ASEAN Women Circle*, di sela-sela acara *ASEAN Friendship Gathering.*

40 TAHUN KERJA SAMA KEMITRAAN ASEAN-SELANDIA BARU

KEMLU.GO.ID

Tahun ini merupakan tahun yang bersejarah bagi kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru yang genap berusia 40 tahun. Peran Indonesia sebagai Country Coordinator kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru periode 2015-2018 perlu dioptimalisasi guna memanfaatkan berbagai peluang kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru ini.

Jika membicarakan negara mitra wicara ASEAN di kawasan Pasifik, masyarakat Indonesia mungkin lebih mengenal Australia dibandingkan Selandia Baru. Tentunya hal tersebut disayangkan mengingat Selandia Baru merupakan salah satu mitra wicara paling awal yang menjalin kerja sama dengan ASEAN. Selandia Baru telah memainkan peran penting dan berkontribusi secara positif dalam mendukung proses integrasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk dalam pembentukan Masyarakat ASEAN tahun 2015.

Sejarah Negara "Kiwi" menjadi Mitra Wicara ASEAN

Selandia Baru atau yang sering disebut sebagai negara "Kiwi" resmi menjadi Mitra Wicara ASEAN pada tahun 1975. Hubungan kemitraan kedua pihak semakin meningkat ketika Selandia Baru bersama Australia dan Jepang menjadi mitra wicara ASEAN pertama yang menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (*Summit*) bersama ASEAN pada tahun 1977. Hingga tahun 2005, barulah kemitraan ASEAN-Selandia Baru menunjukkan peningkatan yaitu dengan diselenggarakannya KTT Peringatan 30 Tahun ASEAN-Selandia Baru-Australia di Vientiene, Laos pada tanggal 28 Juli 2005. Pada KTT itu, Selandia Baru menandatangani *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC).

Negara kepulauan di barat daya Samudera Pasifik tersebut tercatat turut aktif berpartisipasi dalam serangkaian pertemuan konsultasi dengan ASEAN, antara lain, *ASEAN Regional Forum* (ARF), *ASEAN-Closer Economic Region* (CER), *ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus* (ADMM+), *ASEAN Post Ministerial Conference* (PMC 10+1) serta *ASEAN-New Zealand Dialogue*. Selain itu, Selandia Baru juga terlibat aktif dalam *East Asia Summit* (EAS). Dalam hal ini, Indonesia terus mendorong kerja sama eksternal ASEAN termasuk ASEAN-Selandia Baru yang strategis, konkret dan bermanfaat.

Bagi Selandia Baru, arti penting kerja sama kemitraan dengan ASEAN antara lain tercermin dengan penunjukan Duta Besar pertama Selandia Baru untuk ASEAN di Jakarta, Stephanie Pamela Lee, pada tahun 2014.

Prioritas Indonesia sebagai *Country Coordinator*

Dalam Pertemuan tingkat Menteri ASEAN-Selandia Baru pada awal bulan Agustus 2015 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia, tongkat estafet *Country Coordinator* kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru resmi diserahkan dari Laos kepada Indonesia untuk periode 2015-2018.

Indonesia, sebagai *Country Coordinator* yang baru, telah mengusulkan program prioritas antara lain penguatan implementasi *Four Flagship Initiatives*, khususnya ketahanan pangan dan UMKM. Program *Four Flagship Initiatives* meliputi *ASEAN-New Zealand Scholarship Program, Agriculture Diplomacy, Young Business Leaders Initiative* dan *Disaster Management*

dengan nilai investasi mencapai lebih dari NZ$50 juta per tahun.

Indonesia juga mengharapkan dukungan Selandia Baru dalam menjembatani ASEAN untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Pasifik Selatan, melalui forum *Melanesian Spearhead Group (MSG), Pacific Islands Forum (PIF)* dan *South West Pacific Dialogue (SWPD)*.

Dalam melaksanakan kerja sama ini, Selandia Baru mengusung dua prakarsa, yaitu "*People Strategy*" dan "*Prosperity Strategy*". "*People Strategy*" bertujuan untuk semakin memperkuat hubungan *people-to-people contacts* antara ASEAN-Selandia Baru melalui pemberian beasiswa, pertukaran pelajar dan mahasiswa serta pelatihan kepemimpinan. Sedangkan "*Prosperity Strategy*", bertujuan untuk mendukung pengembangan dan integrasi ekonomi kawasan ASEAN dengan mensinergikan area kerja sama yang menjadi unggulan Selandia Baru, yaitu perdagangan, energi *geothermal* dan pertanian serta ketahanan pangan.

WIKIMEDIA.ORG

Wellington, ibukota Selandia Baru.

Perkembangan Hubungan ASEAN-Selandia Baru

Di bidang ekonomi, hubungan kemitraan ASEAN-Selandia Baru dilaksanakan di bawah kerangka *ASEAN–Australia and New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA) yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Indonesia, secara resmi menerapkan (*Entry into Force*) AANZFTA sejak tanggal 10 Januari 2012.

Banyak kemajuan yang dicapai dari AANZFTA tersebut, antara lain nilai perdagangan ASEAN-Selandia Baru di tahun 2014 mencapai peningkatan sebesar 9,4% dibandingkan tahun 2013 dengan nilai USD 9,7 miliar. Perkembangan di bidang investasi juga tak kalah menggembirakan. *Foreign Direct Investment* Selandia Baru ke ASEAN pada tahun 2013 mencapai USD 250 juta atau meningkat 127,27% dibandingkan tahun 2012. Penegasan dukungan Selandia Baru terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN diwujudkan dengan meluncurkan *"New Zealand Inc. ASEAN Strategy on New Zealand's ASEAN Partnership: One Pathway to Ten Nations"* pada tahun 2013.

Pada tahun 2014, 133 ribu wisatawan dari ASEAN mengunjungi Selandia Baru. Sebaliknya, wisatawan Selandia Baru telah mengenal Indonesia sebagai destinasi baru untuk tujuan pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan juga didorong dengan dibukanya penerbangan langsung ke Singapura dan *seasonal flight* ke Bali.

40th Anniversary of ASEAN-New Zealand

Pada KTT Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan Strategis ASEAN-Selandia Baru di Kuala Lumpur, Malaysia, 22 November 2015, telah disahkan *Joint ASEAN-New Zealand Leaders' Statement on the 40th Anniversary of ASEAN-New Zealand Dialogue Relations*. Dokumen tersebut menandai peningkatan hubungan kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru dari komprehensif menjadi kemitraan strategis. *Plan of Action (PoA) to Implement the Joint Statement for ASEAN-New Zealand Strategic Partnership* (2016-2020) yang mengakomodir kerja sama perdagangan dan investasi, pariwisata, UMKM, penanggulangan bencana, pertanian, dan ketahanan pangan juga disahkan pada KTT dimaksud.

Seiring dengan perkembangan positif dalam kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru, Selandia Baru telah berkomitmen untuk semakin memfokuskan kerja sama pada dua area strategis yakni *Education and Leadership*, serta *Agriculture and Trade* untuk periode lima tahun ke depan dalam kerangka PoA ASEAN-Selandia Baru 2016-2020. Peningkatan jumlah penerima beasiswa Selandia Baru untuk negara anggota ASEAN dari sekitar 175 pelajar (2014) menjadi lebih dari 225 pelajar (2015) merupakan salah satu bukti keberhasilan implementasi PoA ASEAN-Selandia Baru 2010-2015.

Melihat perkembangan positif dan potensi yang belum sepenuhnya tergali dalam kerja sama kemitraan ASEAN-Selandia Baru, Indonesia perlu bersinergi lebih erat dengan Selandia Baru guna merealisasikan kemitraan yang konkret dan bermanfaat nyata bagi kepentingan masyarakat kedua kawasan. ●

DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

PEMUDA ASEAN-RUSIA PERERAT KERJA SAMA KE DEPAN

MUNRFE.RU

Delegasi Indonesia dan Persatuan Mahasiswa Indonesia Rusia (Permira) Vladivostok, mahasiswa ASEAN dan Rusia, berfoto bersama Djauhari Oratmangun (Duta Besar RI untuk Federasi Rusia dan Belarus), I Gede Ngurah Swajaya (Duta Besar RI untuk ASEAN), dan Iwan Suyudhie Amri (Sesditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI).

Tanggal 8 – 10 Oktober 2015 menjadi momen berharga bagi para pemuda ASEAN dan Russia, karena pada saat itu berlangsung *Russia-ASEAN Youth Summit* yang merupakan pertemuan penting dalam upaya meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kedua pihak di bidang kepemudaan.

Russia-ASEAN Youth Summit merupakan Konferensi Tingkat Tinggi Pemuda dan Mahasiswa Rusia dan ASEAN yang diselenggarakan oleh *ASEAN Center* Moskow, bekerjasama dengan MGIMO dan *Far Eastern Federal University* (FEFU) Vladivostok. Konferensi ini merupakan kali ketiga setelah pertemuan pertama di Moskow (2013), dan pertemuan kedua di Kuala Lumpur, Malaysia (2014).

Pertemuan kali ini dengan tema *"Young Russian-Young ASEAN: Expanding Regional Connection"* diselenggarakan selama 4 hari di Vladivastok, kota paling timur wilayah Federasi Rusia. Sebanyak lebih dari 100 pemuda yang berasal dari kampus terbaik di negara-negara ASEAN dan Rusia menuangkan gagasan untuk memperkuat hubungan Rusia dan ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN tentunya juga mengambil peran penting pada pertemuan ini. Indonesia mengirim 16 pemuda yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dengan tahap seleksi yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Indonesia Rusia (Permira) di Vladivostok bekerjasama dengan GudlakID dan *ASEAN Center* di Moskow. Proses seleksi terdiri dari tiga kategori (administrasi, *essay*, dan wawancara) serta kemampuan bahasa asing, terutama bahasa inggris baik *oral* maupun *written,* kemampuan berdiplomasi, dan pengetahuan mengenai ASEAN. Setelah melalui proses seleksi selama hampir dua bulan, dari 300 lebih aplikasi yang masuk ke panitia, terpilih 16 mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas seperti UI, ITB, ITS, Univ. Brawijaya, dan Univ. Tarumanegara dengan latar belakang jurusan yang berlainan.

Pertemuan ini tidak hanya diikuti oleh pemuda Russia dan ASEAN. Sejumlah pejabat negara serta kalangan akademisi dan politis dari negara-negara ASEAN dan Rusia juga turut hadir. Diantara mereka adalah Ambassador Alexander Ivanov, Duta Besar Rusia untuk Asia Pasifik; Djauhari Oratmangun, Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus; Dr. Victor Sumsky, Direktur *ASEAN Center*; Iwan Suyudhie Amrie, Sesditjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI; I Gede Ngurah Swajaya, mewakili P*ermanent Representative/Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to ASEAN*; Ambassador Rosario G. Manalo, *Philippine Representative di ASEAN Inter Governmental Commission on Human Rights* (mantan diplomat Filipina); Dr. Natalia Stapran, Direktur *Russian APEC Study Center* di *Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration* (RANEPA);

Prof. Kriengsak Chareonwongsak, mantan penasehat Perdana Menteri Thailand, dan juga anggota Parlemen Thailand; Mr. Oudet Souvannavong, *Co-Chairman of ASEAN Business Advisory Council*.

Pertemuan diadakan di *Far Eastern Federal University* (FEFU) tanggal 09 Oktober 2015, dan *plenary session* dihadiri oleh para duta besar dari negara-negara ASEAN dan *Key note Speaker* dari perwakilan institusi ASEAN-Russia. Usai *plenary session* para delegasi menghadiri *workshop* yang dibagi dalam tiga kelompok sesuai pilar Masyarakat ASEAN, yaitu: *ASEAN-Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community*.

Pertemuan menghasilkan *final declaration* dari ketiga pilar Masyarakat ASEAN dalam kerjasama Russia – ASEAN, salah satunya *Final Declaration of Political-Security Community and Russia - ASEAN Cooperation* yang menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Rusia dan ASEAN dalam mempromosikan nilai-nilai positif, seperti perdamaian dan kepercayaan, serta nilai-nilai negatif seperti *extermism* dan *radicalism*, mendekatkan dan memperkuat kerjasama dalam bidang *cyber* dan *IT security* antara Rusia dan ASEAN, dan usulan untuk memajukan kerjasama Rusia-ASEAN di bidang *emergency response, disaster, management,* dan *humanitarian assistance*.

Sementara itu, *Final Declaration of Economic Community and Russia - ASEAN Cooperation* antara lain menekankan perlunya mengeksplorasi kemungkinan FTA antara Rusia dan ASEAN, memulai kerjasama dalam memudahkan proses prosedur *visa for bussiness (e-visas)*. Sedangka *Final Declaration of Socio-Cultural Community and Russia - ASEAN Cooperation* diantaranya menekankan perlunya untuk mengembangkan *brand* dan *motto* untuk Russia-ASEAN dalam *cultural exchange year*, mempromosikan *youth cultural* dan *educational tourism* antara Russia dan ASEAN melalui kerja sama antar universitas, dan membangun jaringan antara organisasi pemuda Russia dan ASEAN.

Pertemuan ini telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan bagi para delegasi, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang delegasi Indonesia, Alfajri dari Jurusan Sastra Rusia Universitas Indonesia. Menurutnya, *Summit* ini memberikan kesan mendalam bagi dirinya, karena ia dan para delegasi ASEAN lainnya berkesempatan untuk mengenal kebijakan luar negeri Rusia yang saat ini berfokus pada pengembangan wilayah timur di Asia Pasifik. Ia juga turut berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menjalin kerjasama antar pemuda Rusia dan ASEAN. "Terlebih lagi, kami diharapkan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan yang berwawasan global dan membuka jalan bagi hubungan antara Rusia dan ASEAN di masa depan," papar Alfajri.

Alfajri menambahkan bahwa menyambut Masyarakat ASEAN yang juga menjadi topik diskusi, para delegasi ASEAN dituntut untuk mengenalkan Masyarakat ASEAN dan perannya, kepada delegasi-delegasi Rusia, serta sinerginya dalam hubungan Rusia dan ASEAN ke depan.

Tidak hanya pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh para delegasi Indonesia. Pada *summit* ini mereka juga berusaha membangun jaringan antar organisasi pemuda Russia dan ASEAN sesuai yang tercantum pada *final declaration*. Lebih lanjut Alfajri mengemukakan visi dan misi para delegasi Indonesia setelah mengikuti *summit* ini. "Setelah summit berlalu kami tidak hanya ingin menjadi delegasi Indonesia tanpa melakukan perubahan. Kami memiliki visi dalam meningkatkan hubungan Russia dan ASEAN dengan fokus pada pengembangan pemuda. Saat ini kami sedang berusaha membentuk organisasi Russia-ASEAN dengan nama RUSSEAN (*Russia-ASEAN Youth Association*) dan kami sangat berharap setelah organisasi ini terbentuk, hubungan kerjasama ASEAN-Russia semakin lebih baik dan tentunya dapat memberikan manfaat bagi pemuda Indonesia," pungkas Alfajri. ●

GISELA LUIGI SEPTIANA

KOREAKONSULT.COM

Vladivostok, kota tempat penyelenggaraan *Russia-ASEAN Youth Summit.*

BERSAING DI ERA MEA

TIPS BISNIS DI THAILAND

LUXTRAV.COM

Bangkok, Thailand. Thailand merupakan pasar terbesar kedua di ASEAN setelah Indonesia.

Seiring dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sejumlah pengusaha di seluruh negara anggota ASEAN telah menyiapkan diri untuk merambah ke pasar yang lebih luas. Indonesia sebagai negara dengan pasar terbesar di ASEAN tentunya akan menjadi target pasar berbagai produk asing dari negara anggota ASEAN lainnya. Melihat situasi tersebut, para pengusaha Indonesia pun tidak tinggal diam. Mereka aktif mencari peluang untuk menjajakan produk dan jasanya di wilayah ASEAN.

Salah satu target pasar prospektif yang menjadi bidikan para pengusaha adalah pasar Thailand. Hal tersebut cukup beralasan mengingat Thailand memiliki beberapa aspek strategis, yaitu merupakan pasar terbesar kedua di ASEAN (setelah Indonesia) dengan jumlah populasi mencapai 68 juta orang; lokasi strategis, *at the crossroads of Asia*, memudahkan untuk menjangkau pasar utama di Asia, yaitu Tiongkok dan India, serta pasar di *Greater Mekong sub-region*, yaitu Myanmar, Kamboja, dan Laos; dukungan infrastruktur kelas dunia, seperti 7 *airport* internasional, transportasi massal di Bangkok, 6 *sea deep ports* dan 2 *international river ports;* serta kebijakan pemerintah yang fokus pada liberalisasi pasar dan perdagangan bebas. Berbagai aspek strategis tersebut turut dilengkapi dengan ciri khas masyarakat Asia, yaitu kehangatan penduduknya dan *gracious hospitality*, telah membuat banyak pelaku usaha jatuh hati kepada Thailand. Namun, untuk memasuki pasar dan memulai bisnis di Thailand tidak semudah membalik telapak tangan.

Hubungan Personal

Sebagaimana praktek bisnis di berbagai belahan dunia, cara terbaik untuk berinvestasi atau berdagang adalah dengan mengenal secara langsung mitra usaha. Dalam hal ini, komunikasi dan pendekatan personal sangat penting. Menurut Philip Wylie, pengarang buku *"How to Establish A Successful Business in Thailand"*, pada dasarnya untuk menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha Thailand, diperlukan upaya membangun kedekatan secara personal. Orang Thai membangun persahabatan secara pelan dan akan melakukan bisnis bila mereka merasa nyaman. Pengusaha yang secara agresif menawarkan barang atau jasanya memiliki kesempatan yang kecil untuk berhasil dalam penjualan.

Pentingnya hubungan pribadi dalam menjalin hubungan bisnis juga ditegaskan oleh pihak KBRI Bangkok. Menurut Pejabat Fungsi Ekonomi KBRI Bangkok, pelaku bisnis asing hendaknya tidak meremehkan arti penting hubungan pribadi dan *sanuk* (kesenangan) baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Biasanya orang Thai akan bekerja sama dengan orang yang disukai dan dihormati. Oleh karena itu, pelaku usaha asing hendaknya harus tampil profesional, berpakaian rapi, membawa kartu nama bisnis pada pertemuan bisnis dan bersikap sopan, tenang serta tidak mengekspresikan kemarahan atau sikap agresif di hadapan orang Thai jika menghadapi masalah.

Apabila menemui masalah dalam hubungan bisnis, hendaknya bersikap tenang, hindari sikap menyalahkan orang lain, dan usahakan untuk bersikap bijak dengan meminta bantuan mitra orang Thai untuk bernegosiasi atas nama pelaku usaha. Hal ini diamini oleh KBRI Bangkok. Bila menghadapi masalah, utamakan

BANGKOK.COM

Siam Paragon, salah satu pusat perbelanjaan modern besar di Bangkok,

BANGKOK.COM

Kesibukan di Comkhlong Lat Mayomd, salah satu pasar terapung Bangkok.

negosiasi sebagai solusi dan sebisa mungkin hindari melibatkan polisi atau aparat hukum.

Aspek lain yang dipandang penting dalam membangun hubungan personal sekaligus memudahkan berbisnis di Thailand adalah dengan penguasaan bahasa Thai. Di Thailand sendiri, penguasaan bahasa Thai akan memberikan keuntungan tersendiri. Biasanya orang Thai maupun orang yang berbahasa Thai akan diberikan tawaran yang lebih rendah daripada orang asing. Beberapa pengusaha asing sukses di Thailand meminta bantuan orang Thai untuk bernegosiasi dengan *supplier* maupun pejabat pemerintah.

Interaksi Bisnis

Selain menjaga hubungan personal, ada baiknya dalam berinteraksi bisnis dengan mitra Thailand memerhatikan beberapa hal, seperti komisi. Dalam praktik bisnis di Thailand memberikan *referral commissions* untuk perkenalan bisnis merupakan suatu hal yang lumrah. Besarnya komisi (*fee*) yang diberikan biasanya berkisar antara 10% - 20% dari harga jual. Apabila seorang pengusaha asing berhasil dalam menjalin bisinis, ada baiknya untuk menanyakan mengenai *referral commissions*.

Interaksi bisnis lainnya yang perlu diperhatikan adalah jangan mencoba merubah sistim – karena pengusaha asing tidak akan pernah menang. Dalam hal ini, pengusaha asing hendaknya dapat menyesuaikan dengan sistem dan aturan yang berlaku. Terkait dengan sistim, sebaiknya pengusaha asing tidak membayar orang di muka, karena hal itu membuat pengusaha asing kehilangan kontrol terhadap uang yang sudah dibayarkan. Hal lain yang perlu dihindari yaitu menawarkan kredit atau pinjaman yang tidak aman ke mitra, kecuali jika punya margin keuntungan yang besar untuk menutupi biaya hutang yang buruk. Hutang akan membawa pengaruh negatif terhadap hubungan personal sehingga secara tidak langsung akan mengganggu jalannya usaha.

Sebagai langkah awal berbisnis di Thailand, para pengusaha Indonesia hendaknya dapat menjajaki komunikasi dengan mitra usaha potensial di Thailand. Komunikasi dapat dilakukan baik secara individual atau memanfaatkan payung organisasi pengusaha, seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) atau Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Pelaku usaha Indonesia juga juga dapat menghubungi KBRI Bangkok untuk mendapat informasi mengenai mitra dan peluang usaha di Thailand.

Untuk memperkuat posisi tawar pelaku usaha Indonesia di mata pelaku usaha Thailand, perlu memperhatikan standar produk dan jasa yang ditawarkan. Minimal para pelaku usaha Indonesia dapat memenuhi standar yang ditetapkan di Indonesia. Hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Menurut BSN, standarisasi adalah senjata bagi para pelaku usaha untuk bersaing. Upaya standarisasi dilakukan secara komprehensif, integral, dan visioner.

Sebagai gambaran, beberapa peluang usaha dengan pengusaha Thai dapat dijajaki dalam ekspor/impor produk-produk berikut, yaitu batu permata dan ornamen, plastik dan barang-barang terbuat dari plastik, karet dan barang-barang terbuat dari karet, permesinan dan suku cadang, komputer dan asesoris, kendaraan bermotor dan suku cadang, peralatan listrik dan suku cadang, gula dan *snack* berbahan gula, *seasoning* terbuat dari daging, ikan, binatang air, biji-bijian, serta besi dan baja. ●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

40 TAHUN KERJA SAMA PEREMPUAN DI ASEAN

Kerjasama di bidang perempuan telah menjadi perhatian ASEAN sejak 40 tahun lalu. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat banyak perkembangan dan capaian yang telah diraih.

Charles Malik, seorang diplomat dan filsuf Lebanon, pernah menyampaikan bahwa *"the fastest way to change society is to mobilize the women of the world"*. Empat puluh tahun lalu, kesadaran untuk memajukan peran perempuan dalam berbagai bidang di ASEAN seperti yang terkandung dalam kutipan Charles Malik tersebut, telah dimulai sejak "Seminar ASEAN mengenai Integrasi Wanita dalam Pembangunan" pada tahun 1975 di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, diselenggarakan pertemuan ke-1 *ASEAN Sub-Committee on Women* (ASCW) di Manila, Filipina, pada tahun 1976. Pertemuan diadakan secara rutin setiap tahun hingga pada tahun 2001, ASCW diubah menjadi *ASEAN Committee on Women* (ACW), yang mengadakan Pertemuan pertama pada tahun 2003 di Luang Prabang, Laos.

Komitmen ASEAN dalam kerja sama bidang perempuan telah berkembang mengikuti kebutuhan dan situasi di tingkat regional dan internasional. Dari semula terfokus secara umum pada upaya pemajuan perempuan, kini komitmen tersebut mencakup penghapusan kekerasan terhadap perempuan, keterkaitan perempuan dengan permasalahan global seperti masalah lingkungan hidup, hingga pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan dan kesetaraan gender. Hal ini terlihat dalam beberapa dokumen yang telah disepakati, yaitu 1988 *Declaration on the Advancement of Women in the ASEAN; 2004 Declaration on the Elimination of Violence Against Women (DEVAW); dan Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability* (2011).

FLICKR.COM

Pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Women* Pertama bertema *Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability.*

Kemajuan Kerja Sama Perempuan di ASEAN

ACW memiliki *work plan* yang dijalankan dalam periode tertentu, seperti *Work Plan to Operationalize DEVAW* dan *Work Plan on Women's Advancement and Gender Equality*, yang masa berlakunya telah selesai pada tahun 2010. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pemenuhan

rencana aksi terkait perempuan dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (2009-2015), ACW telah menyusun dan mengimplementasikan *ACW Work Plan* 2011-2015 yang bertujuan untuk memberikan masukan terkait pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program pemerintah di ASEAN.

Pada Pertemuan *2nd ASEAN Ministerial Meeting on Women* tanggal 23 Oktober 2015 di Manila, Filiina, dilaporkan bahwa dari 21 proyek yang tercantum pada ACW Work Plan 2011-2015, 71 persen telah selesai dilaksanakan (15 proyek), 2 proyek sedang berjalan dan sisanya akan dilanjutkan pada *work plan* periode berikutnya. Pertemuan tersebut juga mengesahkan secara prinsip *ACW Work Plan* (2016-2020) yang telah diselaraskan dengan Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025. *ACW Work Plan* (2016-2020) bertujuan untuk meningkatkan proporsi kepemimpinan perempuan pada posisi dalam jabatan publik dan sektor swasta di ASEAN; memajukan *gender-sensitivity* dan mengurangi *gender-stereotyping* di sekolah negeri; meningkatkan pemahaman praktisi media terkait kesetaraan gender; memperkuat mekanisme pengarusutamaan gender pada tiga Pilar ASEAN; memperkuat kerangka hukum tingkat nasional dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan; meningkatkan akses pengusaha perempuan pada pendanaan, pasar dan keterampilan; serta meningkatkan inisiatif regional dan nasional dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Berbeda dengan *ACW Work Plan* sebelumnya, *ACW Work Plan* (2016-2020) menggunakan p*rogrammatic approach* yang berkelanjutan, dan bukan lagi *project-based approach* untuk menghindari *one-off projects*. *ACW Work Plan* (2016-2020) juga disusun dengan strategi untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di seluruh Pilar ASEAN.

Dalam kurun waktu 2011-2015, ACW mencatat beberapa kemajuan. **Pertama**, ACW berhasil mendorong terbentuknya forum tingkat tinggi yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali untuk mendiskusikan permasalahan terkait kesetaraan gender, yakni melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Women* (AMMW). *Preliminary Meeting* diselenggarakan di Bogor pada tahun 2011 dan Pertemuan perdana diselenggarakan di Laos tahun 2012.

Kedua, ACW berhasil meningkatkan kesadaran akan kesetaraan gender di ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Hal ini disebabkan hampir seluruh proyek dan aktivitas ACW melibatkan badan sektoral ASEAN lainnya yang terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ketiga, ACW berhasil memasukkan dimensi gender dalam dokumen kebijakan strategis dan berbagai laporan, seperti dalam Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, *ASEAN Declaration on Social Protection dan ASEAN Report on the Millennium Development Goals for 2015*.

Keempat, ACW berhasil meningkatkan kapasitas dalam hal pengarusutamaan gender dan *gender budgeting*, dengan diselenggarakannya berbagai diskusi terkait hal tersebut pada beberapa Pertemuan dan *workshop* ASEAN.

Kemajuan tersebut secara lebih spesifik juga terkait dengan beberapa isu sebagai berikut: **Pertama**, isu pemberdayaan ekonomi perempuan yang salah satunya dicapai dengan pendirian *ASEAN Women Entrepreneurs' Network* (AWEN) pada April 2014 sebagai wadah untuk berbagi dan bertukar keterempilan, pengetahuan, teknologi, serta business matching di antara pengusaha perempuan di ASEAN.

PCW.GOV.PH

Para peserta Pertemuan *2nd ASEAN Ministerial Meeting on Women* tanggal 23 Oktober 2015 di Manila, Filipina.

Kedua, isu buruh migran perempuan, dengan diselenggarakannya *"Regional Conference of Senior Officials on Migration Management Practices and Experiences towards Policies to Promote and Protect the Rights and Welfare of Women Migrant Workers"* di Manila, Filipina pada tanggal 13-14 November 2014. Filipina dan Indonesia merupakan negara koordinator.

Ketiga, isu kesehatan perempuan, seperti perlindungan ibu, kekerasan terhadap perempuan dan HIV-AIDS, melalui kerja sama dengan badan sektoral ASEAN terkait.

Keempat, isu perubahan iklim, dengan diadopsinya *Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and ASEAN Women's Partnership for Environmental Sustainability* (2011) dan

dikembangkannya *Guidelines in Mainstreaming Gender Issues in Climate Change Adaptation and Mitigation*. Saat ini guideline tersebut tengah dalam proses *review ACW*.

Kelima, isu pendidikan, seperti dengan memberikan perhatian pada upaya penyusunan kurikulum dan bahan ajar yang bersifat gender sensitive sebagai langkah penting dalam menghapus *sexism* dan *stereotyping*.

Selain pengimplementasian *ACW Work Plan*, sebagai suatu komitmen dalam pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak di kawasan Asia Tenggara, ACW bersama *Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development* (SOMSWD), badan sektoral ASEAN yang membawahi kerja sama di bidang anak, melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas *Terms of Reference of the ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC)*, hingga akhirnya ACWC terbentuk pada tahun 2010.

Peran Aktif Indonesia

Selain aktif dalam mendorong pembentukan AMMW, Indonesia senantiasa terlibat aktif dalam proses penyusunan dan implementasi *ACW Work Plan*. Pada *ACW Work Plan* 2011-2015, Indonesia menjadi negara koordinator untuk beberapa proyek yang sudah berhasil diimplementasikan seluruhnya.

Pertama, Indonesia telah menyelenggarakan *"Workshop on Best Practices of Women Empowerment in Small and Micro Entrepreneurship in ASEAN"* di Lombok, tanggal 14-16 Juni 2011. Proyek ini bertujuan untuk membangun jaringan dan kolaborasi institusi microfinance di ASEAN.

Kedua, Indonesia dan Filipina menyelenggarakan *"Regional Workshop on Strengthening National Capacities to Collect Violence Against Women (VAW) Statistics in the ASEAN Region"* di Jakarta, tanggal 6-9 Agustus 2012. Proyek tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengumpulan *sex disaggregated data* guna mengimplementasikan DEVAW. Workshop ini dinilai sangat bermanfaat untuk memberikan petunjuk bagi negara-negara ASEAN dalam merencanakan survei nasional masing-masing untuk mengukur prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga, Indonesia dan Filipina menyelenggarakan *"Regional Training and Development of Advocacy Tools and Modules to Promote Wider Application of Gender Budgeting by Ministries of Finance and Planning*" di Jakarta, tanggal 27-29 November 2013, serta *"Regional Trainings on Social Protection and Gender Budget Analysis for ASEAN Member States"* di Jakarta, tanggal 27-29 Agustus 2014.

Melalui kepemimpinan dalam *workshop* terkait *gender responsive budgeting,* terutama pada pengaplikasiannya dalam program perlindungan sosial, kontribusi Indonesia sangat diakui dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya alokasi sumber daya dalam upaya pengarusutamaan gender. Kesuksesan proyek tersebut membuat Indonesia kembali menjadi negara koordinator untuk dua proyek terkait *gender budgeting* pada *ACW Work Plan* (2016-2020), yaitu untuk menyelenggarakan *"Regional Workshop to Strengthen Capacity to Implement Sex-disaggregated Data and Gender Planning and Budgeting in ASEAN Sectoral Bodies"* dan *"Follow-up Project to the Regional Training and Development of Advocacy Tools and Modules to Promote Gender-Responsive Budgeting and/or Regional Training on Social Protection and Gender Budget Analysis"*.

Selain kedua proyek tersebut, pada *ACW Work Plan* (2016-2020), Indonesia akan menjadi negara koordinator untuk 2 proyek lainnya, yaitu dalam menyelenggarakan *"Sharing of initiatives and challenges to increase women's leadership in the private sector"* dan *"Policy Dialogue of ACW, ACWC, ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime(SOMTC) and SOMSWD on Gender Responsiveness in the Implementation of ASEAN Convention on Trafficking in Persons* (bersama Filipina).

MMBIZTODAY

Dengan diimplementasikannya *ACW Work Plan* (2016-2020), diharapkan perkembangan dan kemajuan kerja sama perempuan di ASEAN dapat semakin meningkat. Keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih merupakan buah kerja sama dan peran aktif berbagai pihak, yang keterlibatannya harus terus didorong di masa mendatang, termasuk dalam upaya koordinasi lintas Pilar ASEAN. Hal ini tentu dengan keyakinan bahwa majunya perempuan ASEAN akan dapat berkontribusi dalam mendorong perubahan yang lebih baik, khususnya bagi ASEAN, seperti yang diutarakan Charles Malik di awal tulisan ini. •

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

HIGHLIGHT KERJA SAMA EKSTERNAL ASEAN

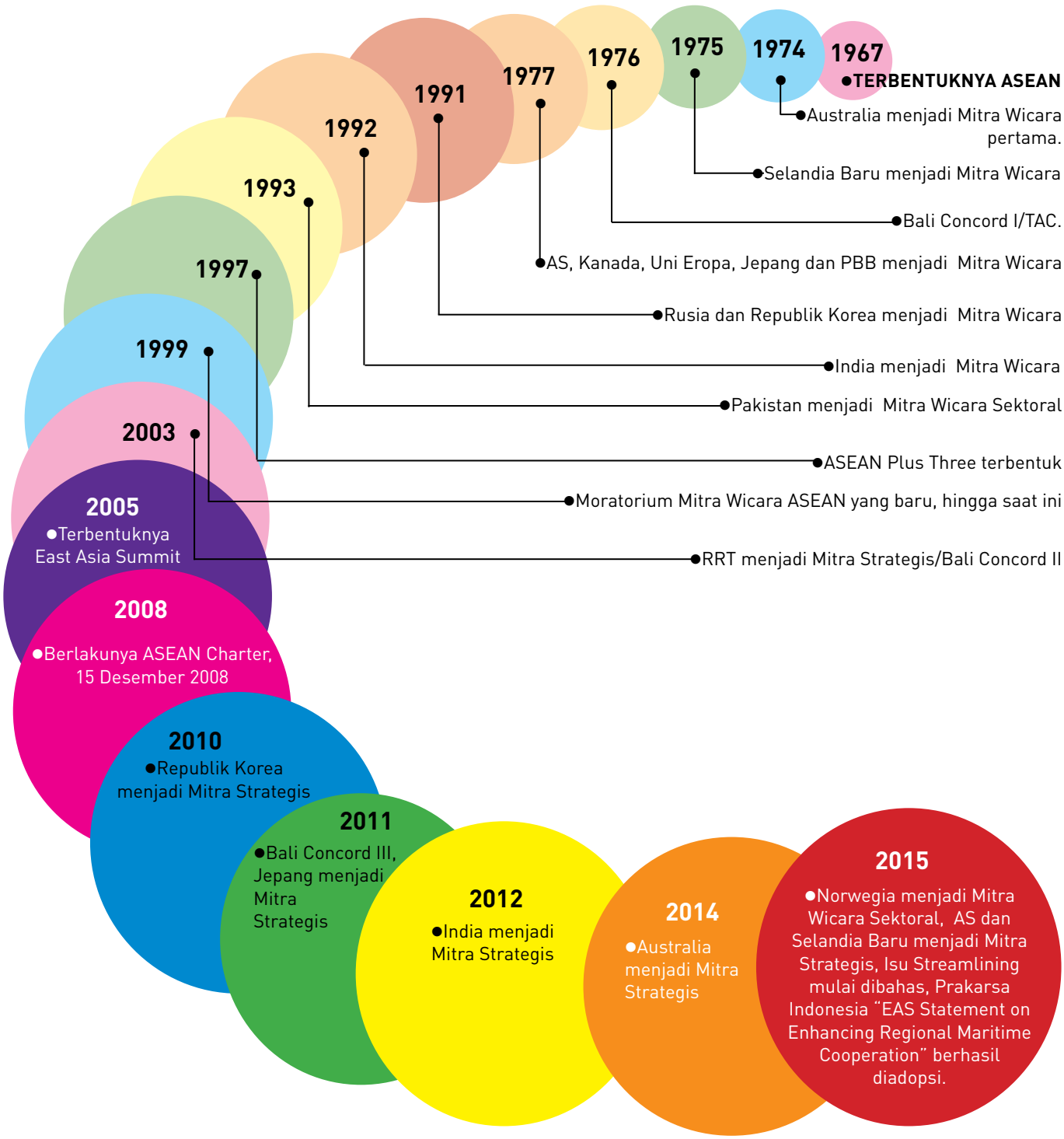

KTT PERINGATAN ASEAN-MITRA WICARA

- 2007 — 30 tahun ASEAN-Uni Eropa
- 2011 — 15 tahun ASEAN-Rusia
- 2012 — 15 tahun ASEANPlus Three
- 2012 — 35 tahun ASEAN-Kanada
- 2012 — 20 tahun ASEAN-India
- 2013 — 40 tahun ASEAN-Jepang
- 2013 — 10 tahun Kemitraan Strategis ASEAN-RRT
- 2014 — 25 tahun ASEAN-Republik Korea
- 2014 — 40 tahun ASEAN-Australia
- 2015 — 40 tahun ASEAN-Selandia Baru

Hingga saat ini, ASEAN telah secara aktif menjalin hubungan dengan 11 mitra wicara yaitu, AS, Australia, India, Jepang, Kanada, Republik Korea, RRT, Rusia, Selandia Baru, Uni Eropa dan PBB. ASEAN juga mempunyai hubungan Mitra Wicara Sektoral dengan Pakistan dan Norwegia.

Selain mekanisme kerja sama *ASEAN Plus One*, ASEAN juga menjalin kerja sama melalui mekanisme lain, seperti *ASEAN Plus Three* bersama Jepang, ROK, dan RRT; serta *East Asia Summit* dengan 18 negara peserta.

Saat ini ASEAN dalam proses melakukan *assessment* atas aplikasi beberapa pihak eksternal yang berminat menjalin kemitraan formal dengan ASEAN. ASEAN-Uni Eropa juga sedang menjajaki peningkatan status kerja sama menjadi kemitraan strategis.

POJOK SOSIALISASI

UNIPDU, PESANTREN PERTAMA YANG MILIKI PSA

Ditjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri kini telah resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU), Jombang, Jawa Timur. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama dalam bentuk Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat Studi ASEAN dan peresmian Kantor Pusat Studi ASEAN (PSA-UNIPDU) di Ruang Gelora Gedung Rektorat UNIPDU pada tanggal 2 November 2015 lalu.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pembentukan Pusat Studi ASEAN dilakukan oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN (KSA), I Gusti Agung Wesaka Puja dan Rektor UNIPDU, Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA, disaksikan oleh Ketua Yayasan Darul Ulum, Drs. H. M. Zaimuddin Wijaya As'ad, MS, Pemda Kabupaten Jombang, dan Pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum. PSA UNIPDU merupakan Pusat Studi ASEAN ke-18 di seluruh Indonesia dan yang keempat di Propinsi Jawa Timur, setelah Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya dan Universitas Wirajaya Sumenep.

Berbeda dengan Universitas Airlangga yang memfokuskan pengkajiannya pada masalah politik dan Universitas Wirajaya Sumenep

memfokus pada kajian ekonomi yakni usaha kecil dan menengah, PSA UNIPDU akan mengembangkan *"Islam Rahmatan lil Alamin"* sebagai fokus kajiannya yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Selain pembentukan PSA, Dirjen KSA dan Rektor UNIPDU juga menyampaikan paparan pada acara seminar dengan tema "Menyongsong Pembentukan Masyarakat ASEAN 2015" di Kampus UNIPDU. Seminar dihadiri sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari pemerintah daerah dan Forum Pimpinan Daerah, para pengurus pesantren, kalangan perguruan tinggi dan mahasiswa, organisasi kepemudaan, para dosen/pengajar serta *civitas akademika* UNIPDU di Jombang. Dirjen KSA menyampaikan tentang perkembangan kerjasama Masyarakat ASEAN dan peluang-peluang pasar kerja sama ASEAN yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan santri UNIPDU dan juga mendorong para santri Darul Ulum untuk mempelopori *Islam Rahmatan lil Alamin*, Islam demokratis dan modernitas dalam konteks masyarakat sosial budaya ASEAN. Rektor UNIPDU menyampaikan antara lain kesiapan dan dukungan UNIPDU untuk mensosialisasikan Masyarakat ASEAN. Dan, sebagai mitra Kementerian Luar Negeri UNIPDU akan menyiapkan langkah-langkah ke depan dalam menyiapkan SDM santri yang *go global/go ASEAN* tanpa meninggalkan ciri keagamaan yang kental dengan dunia pesantren.

Rangkaian kegiatan di Pondok Pesantren Jombang ini ditutup dengan peresmian kantor PSA UNIPDU Jombang oleh Dirjen KSA, disaksikan oleh Ketua Yayasan Darul Ulum serta Rektor UNIPDU. Dengan diresmikannya kantor PSA ini, maka PSA UNIPDU secara resmi telah dapat beroperasi untuk melaksanan kegiatannya.

Direktur Jenderal KSA berharap bahwa pembentukan PSA ini dapat mendorong UNIPDU untuk menjadikan kota Jombang sebagai kota wisata religi bagi wisatawan domestik, ASEAN, dan dunia. Selain itu, ditekankan pula agar PSA UNIPDU dapat memfokuskan kajiannya pada sektor tertentu yang menjadi ciri khas daerah Jombang sebagai kota santri dengan mengedepankan *Islam Rahmatan lil Alamin*. Sekor-sektor lain di bidang ekonomi pun perlu diperhatikan dan dikembangkan, terutama wisata religinya di mana Jombang memiliki rekam jejak yang baik terkait peran para tokoh islam dalam penyatuan wilayah Nusantara dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Harapan ke depan kiranya PSA UNIPDU dapat menjalin kerjasa ma dengan PSA di perguruan tinggi lain di seluruh Indonesia dan membangun mitra kerja sama dengan PSA yang ada di negara-negara anggota ASEAN. •

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

MUKLASON.WORDPRESS.COM

Gedung Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, Jawa Timur. UNIPDU kini memiliki Pusat Studi ASEAN.

FLICKR.COM

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja

PERESMIAN PSA UNPAS
BANDUNG PUNYA DUA PUSAT STUDI ASEAN

Berfokus pada isu sosial budaya, Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Pasundan (Unpas) akan lebih mendekatkan ASEAN kepada masyarakat.

PANORAMIO.COM

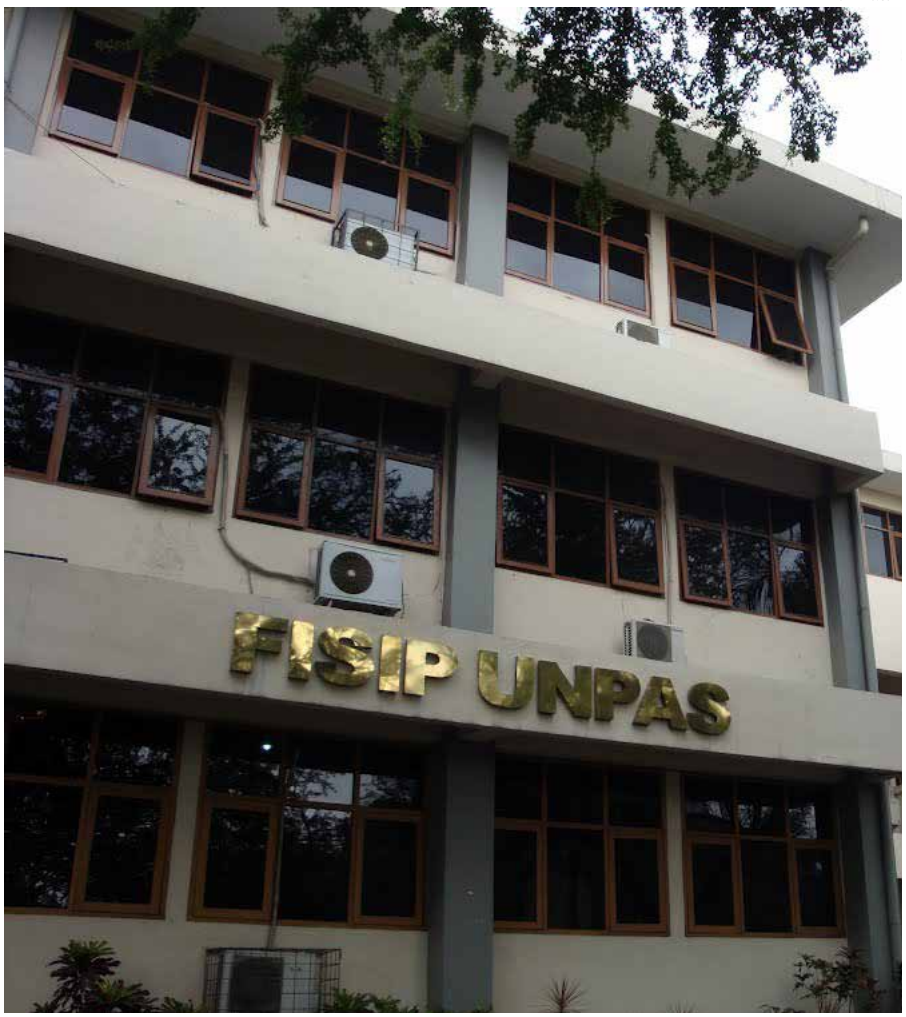

SEKDILU

Sesditjen Kerja Sama ASEAN, Iwan Suyudhie Amri.

Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Pasundan (UNPAS) diharapkan mampu mendorong rasa kekitaan masyarakat Indonesia terhadap ASEAN. Demikian diucapkan oleh Iwan Suyudhie Amri, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri pada saat penandatanganan MoU Pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di Universitas Pasundan.

Peresmian PSA UNPAS ini berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2015, melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (MoU Pembentukan Pusat Studi ASEAN/PSA) antara Dirjen Kerja Sama ASEAN yang diwakili Sesditjen Kerja Sama ASEAN, Iwan Suyudhie Amri dan Rektor Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Eddy Jusuf.

Dengan dibentuknya PSA di UNPAS, kini terdapat lebih dari 18 PSA di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Masing-masing PSA memiliki fokus kegiatan tersendiri, baik di pilar politik- keamanan, pilar ekonomi, maupun pilar sosial-budaya. Hingga saat ini sebagian besar PSA masih berfokus pada pilar politik-keamanan atau pilar ekonomi.

Rektor UNPAS menyampaikan bahwa kerja sama antara Ditjen Kerja Sama ASEAN dengan UNPAS telah terjalin lama. Sejak tahun 2008 hingga 2015, berbagai kegiatan diselenggarakan atas kerjasama kedua pihak, antara lain lomba simulasi sidang ASEAN di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, serta peringatan HUT ke-48 ASEAN Tahun 2015 melalui penyelenggaraan kegiatan *ASEAN Fun Bike* di Bandung. Dengan dibentuknya PSA di UNPAS, universitas tersebut akan berperan aktif membuat kajian-kajian tentang Masyarakat ASEAN yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Seusai penandatanganan, Iwan Suyudhie Amri memberikan kuliah

umum bertemakan "Indonesia dan ASEAN: Isu-Isu Terkini Perkembangan Kerja Sama ASEAN" dihadapan sekitar 250 mahasiswa UNPAS. Pemaparan kuliah umum dibuka dengan pandangan dari dua pakar geo-politik dan geo-strategis Henry Kissinger serta Ian Bremmer. Henry Kissinger dalam bukunya *"World Order"* (2014) menyatakan bahwa Indonesia yang berlokasi di Asia Tenggara memainkan peran penting karena mampu memposisikan diri secara seimbang dan netral dalam menghadapi pengaruh Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Islam. Sementara Ian Bremmer dalam bukunya *"Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World"* (2012) menyatakan Indonesia menjadi salah satu negara pemenang dalam *G-Zero World*, dunia tanpa satu penguasa tertentu, karena memahami bahwa perubahan tatanan global memungkinkan Indonesia untuk bebas mencari manfaat terbaik dari hubungannya dengan berbagai negara lain atau lembaga internasional.

Dengan posisi Indonesia yang menguntungkan tersebut, ASEAN merupakan salah satu manifestasi kebijakan politik Iuar negeri bebas aktif Indonesia. ASEAN juga merupakan bentuk kerja sama konstruktivisme, di mana berbagai negara, masyarakat dan pengusaha, membangun suatu masyarakat melalui kerangka organisasi yang memiliki nilai dan norma bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam sesi diskusi mengemuka pandangan tentang masih sedikitnya pengetahuan pemerintah daerah dan masyarakat Indonesia tentang Masyarakat ASEAN. Iwan Suyudhie Amri menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah banyak melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing daerah. Sebagai contoh, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah telah cukup maju dalam mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat ASEAN. Terkait kesadaran masyarakat, meskipun sudah banyak dilakukan kegiatan sosialisasi, masih banyak yang belum terjangkau karena wilayah Indonesia yang luas serta jumlah penduduk yang banyak. Hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena upaya pemasyarakatan ASEAN akan terus dilakukan. Iwan mencontohkan Malaysia yang meskipun kesadaran masyarakatnya termasuk yang paling rendah, tetapi kesiapan kalangan pengusahanya sangat tinggi.

JUMPAONLINE.COM

Penandatanganan nota kesepahaman pendirian Pusat Studi ASEAN di Unpas, oleh Sesditjen Kerja Sama ASEAN, Iwan Suyudhie Amri (tengah) dan Rektor Unpas, Prof. Dr. H. Eddy Jusuf (kanan).

UNPAS.AC.ID

Rektor Universitas Pasundan, Prof. Dr. H. Eddy Jusuf.

Sejumlah perguruan tinggi negeri yang telah memiliki PSA antara lain Universitas Airlangga, Surabaya; Universitas Andalas, Padang; Universitas Brawijaya, Malang; Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Universitas Hasanuddin, Makassar; Universitas Indonesia, Jakarta; Universitas Mulawarman, Samarinda; Universitas Padjadjaran, Bandung; Universitas Pattimura, Ambon; Universitas Sam Ratulangi, Manado; dan Univeritas Udayana, Denpasar.

Di perguruan tinggi swasta, selain di UNPAS Bandung, terdapat PSA di Universitas 17 Agustus, Semarang; London School of Public Relations, Jakarta; Universitas Wiraraja, Sumenep; dan Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN), BauBau, dan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang.●

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

PRITA KEMAL GANI
GAGAS ORGANISASI PR ASEAN

Karena keberhasilannya dalam memajukan humas di Indonesia dan ASEAN, Prita terpilih mewakili Indonesia meraih ASEAN People's Award 2015. Penyerahan award dilakukan pada acara pembukaan KTT ASEAN ke-27 yang baru lalu di Kuala Lumpur.

Sosok Prita yang lembut, l*ow profile*, ramah namun tegas, memiliki tekad yang kuat dalam menggapai cita-citanya. Ini bisa dilihat dari jam terbangnya dalam menekuni dunia Humas terbilang tinggi. Awalnya ia menempuh pendidikan *public relations* di *London City College of Management Studies,* London dan lulus tahun 1987. Setahun kemudian ia melanjutkan pendidikannya di *International Academy of Management and Economic*, Manila, Filipina.

Istri dari Kemal Effendi Gani, Pemimpin Redaksi Majalah SWA, ini memang seorang yang visioner. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, Prita kemudian kembali ke tanah air dan memulai karir di bidang *public relations* pada sebuah perusahaan swasta internasional. Prita begitu jeli melihat peluang ke depan. Mengingat saat itu belum ada sekolah khusus mengenai PR, lalu ide briliannya muncul untuk mendirikan sebuah lembaga kursus PR pada tahun 1992 yang merupakan cikal bakal dari LSPR – Jakarta.

Kesuksesannya dalam membangun LSPR-Jakarta telah mengantar sosok yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1961 ini untuk meraih segudang penghargaan dari dalam dan luar negeri. *Award* yang diterimanya datang silih berganti seiring dengan keberhasilannya dalam mengembangkan dunia kehumasan. Penghargaan tersebut antara lain, *Indonesian Women Award 2012, The Inspirational Award 2012, PR Person 2014.* Pada Januari 2015, Prita terpilih mewakili Indonesia dalam *Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women (EWW) Asia-Pacific 2015,* sebuah program kepemimpinan untuk kelompok pengusaha wanita terpilih di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki bisnis potensial di masa depan.

Penghargaan bergengsi lain yang diraihnya baru-baru ini, yaitu *ASEAN People's Award (APA). Award* ini diberikan kepada individu atau organisasi mewakili sepuluh negara anggota ASEAN sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi terhadap pembangunan ASEAN. Prita telah terpilih mewakili Indonesia dalam kapasitasnya selaku pemrakarsa sekaligus Ketua *ASEAN Public Relations Network* (APRN). Penyerahan APA dilakukan dihadapan para pemimpin ASEAN pada saat upacara pembukaan KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) tanggal 21 November 2015. Para penerima APA juga mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 10.000 dolar AS dengan tujuan untuk mendorong mereka terus berkarya melanjutkan kontribusinya terhadap *community building* di ASEAN.

LSPR.EDU

Prita Kemal Gani, menerima ASEAN People's Award dalam acara pembukaan KTT ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Berpikir Global

Prita merupakan seorang pemimpin yang berpikir global, dan tak pernah puas dengan apa yang telah dicapainya. Perjuangan dan upayanya di bidang pendidikan Humas dilakukan dengan penuh ketekunan. Dia tidak sekadar memajukan Humas Indonesia, tapi berpikir global dengan memajukan Humas ASEAN. Ide briliannya dalam menggagas *Declaration of ASEAN Public Relations Network 2014* jelang pemberlakuan Masyarakat ASEAN 2015, telah mengundang pujian dan apresiasi dari para praktisi humas, tidak saja di dalam negeri tapi juga di sejumlah negara ASEAN.

Prita melihat selama ini ada kekhawatiran bahwa pemberlakuan Komunitas ASEAN akan berdampak pada membanjirinya tenaga kerja untuk mengisi *job* di Indonesia, sehingga tenaga humas lokal kehilangan pekerjaan. Nah dengan APRN akan muncul suatu pandangan baru bahwa yang datang ke Indonesia atau Filipina misalnya, itu suatu hal yang menyenangkan atau bersifat *connectivity*. "Jadi kita bisa *connect*. Misalnya kemampuan dan pengalaman kita di PR, seperti *crisis PR, corporate PR*, akan dibagi ke negara tetangga yang tergabung dalam APRN. Kemudian orang Filipina dengan kemampuan *public speaking* yang baik akan berbagi dengan orang Indonesia yang kebanyakan malu-malu. Jadi mereka lebih terlatih. Apabila disatukan jadi lebih bagus. Inilah kelebihan APRN," ujarnya yakin.

Menurut Prita, APRN merupakan wadah bagi profesi Humas dari seluruh negara ASEAN supaya saling kenal, bersatu kemudian *sharing best practices*. Begitu juga dengan akademisi, akan terjadi *sharing* kurikulum, *sharing expertise* pengajar, sehingga Humas ASEAN mempunyai kekuatan bersama dan pada akhirnya bisa mempromosikan ASEAN ke *beyond* ASEAN. Jadi orang akan melihat ASEAN secara utuh.

APRN dibentuk dengan tujuan untuk menggeneralisasi visi, misi, dan standar profesi PR di kawasan ASEAN. Dengan *tagline*-nya: *"The Voice of Public Relations ASEAN"*, saat ini APRN telah menjadi organisasi PR tertinggi di ASEAN. •

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

POTENSI PARIWISATA NUSANTARA MENGHADAPI MEA

NATIONAL GEOGRAPHIC

AMIGAYOTRAVEL

BUNAKENDIVING.CO

ANEKATEMPATWISATA.COM

Lokasi wisata Nusantara yang menarik, antara lain searah jarum jam Borobudur di Jawa Tengah, Taman Nasional Komodo di NTT, Gunung Bromo di Jawa timur, dan Bunaken di Manado.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan wisata alam tropis terbesar dan terluas. Keragamaan dan keindahaan pariwisatanya mengundang kekaguman dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.

Potensi wisata alam yang dimiliki Indonesia lebih besar dibandingkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Namun, patut disayangkan bahwa pengembangan industri pariwisata di Indonesia masih belum dilakukan secara optimal dibandingkan negara-negara lain. Padahal, Indonesia memiliki begitu banyak kelebihan dan daya tarik tersendiri di bidang ini.

Untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata, berbagai upaya berikut perlu dilakukan melalu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:

1. Pemasaran wisata melalui media *online*, sosial media, aplikasi di *gadget* dan lainnya untuk mempublikasikan pariwisata Indonesia.
2. Dukungan dalam bentuk kemudahaan perizinan serta kelancaran proses administrasi, pemberian fasiltas, insentif khusus, dan bantuan permodalan untuk proyek investasi.
3. Peningkatan kerjasama dengan pihak asing dalam pengembangan kepariwasataan skala dunia dan pembangunan kawasan pariwisata khusus bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata.
4. Promosi investasi pariwisata ke luar negeri dengan melakukan program atau *event* kreatif bertaraf internasional.
5. Pengembangan destinasi wisata yang memperhatikan kelangsungan lingkungan dan masyarakat.
6. Dukungan dari pemangku kepentingan di daerah seperti DPRD dalam kebijakan/anggaran pariwisata daerah, sektor perbankan daerah seperti BPD dan sebagainya.

Selain itu, Indonesia memiliki begitu banyak tempat pariwisata di berbagai lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Baik itu yang menekankan keindahan alam, kekayaan flora dan fauna, ragam kebudayaan, kerajinan (*handicraft*), kuliner, dan sebagainya. Karenanya, pembangunan infrastruktur di berbagai daerah harus dilaksanakan dengan segera. Tujuannya, untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mempercepat pembangunan SDM pariwisata yang unggul •

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

KATA MEREKA TENTANG MAJALAH MASYARAKAT ASEAN

Agar tampil lebih menarik dari sebelumnya, sejak beberapa edisi lalu, perwajahan dan isi Majalah Masyarakat ASEAN telah diubah. Perubahan ini dimaksudkan agar majalah ini semakin diminati pembaca. Dengan begitu, semakin banyak kalangan yang tertarik untuk membaca majalah ini, dan semakin banyak pula kalangan yang bisa mendapatkan wawasan lebih luas tentang ASEAN dan Masyarakat ASEAN.

Namun, seperti apa sebenarnya pendapat dan kritik para pembaca terhadap isi dan wajah baru majalah ini? Untuk mengetahui itu, kami telah menanyakan langsung kepada sebagaian pembaca terkait respon mereka terhadap perubahan Majalah Masyarakat ASEAN. Berikut ini kami sajikan respon dari beberapa pembaca itu.

DEVI RIYANDARI
TERWAKILI TIGA PILAR ASEAN

Menarik membaca Majalah Masyarakat ASEAN. Ada banyak artikel yang dimuat sudah mewakili dengan tiga pilar ASEAN, yaitu pilar politik ekonomi dan budaya. Selain itu, artikel kesiapan daerah menyongsong MEA bisa memberikan contoh kepada daerah lain untuk menyambut MEA tahun depan. Demikian jawaban Devi Riyandari, saat ditanyakan mengenai isi dan wajah baru Majalah Masyarakat ASEAN.

"Saya menyukai artikel laporan utama karena menambah pengetahuan mengenai banyak hal yang sedang terjadi di ASEAN. Artikel wisata juga sayang untuk dilewati," kata karyawan di sebuah lembaga pendidikan tinggi swasta di Jakarta ini.

Menurutnya, Majalah Masayarakat ASEAN ini sudah bagus, dan ia menyarankan agar tampilan dan warna covernya dipertahankan sehingga menjadi ciri khas dari majalah ini. Ia juga berharap agar artikel wisata negara ASEAN selalu disajikan di tiap edisi, sehingga dapat menjadi referensi. •

SANGAJI EKO SEMBODO
MEMBERI NUANSA BARU

Majalah masyarakat ASEAN edisi 8 dan 9 buat saya menarik dan memberikan nuansa baru tentang perkembangan ASEAN. "Selama ini ASEAN yang saya ketahui hanyalah membahas masalah politik saja, akan tetapi ternyata di dalam ASEAN banyak permasalahannya," ujar Sangaji Eko Sembodo, karyawan di salah satu perusahaan sekuritas yang berlokasi Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, untuk tampilan majalah ini sudah bagus. Warnanya lembut dan judul cover pun sedikit tapi mengandung arti. "Saya kira majalah ini sudah bisa bersainglah dengan majalah pupuler yang lain," tambah Sangaji.

Ia juga menyukai artikel prekonomian dan wisata karena bisa menambah wawasan dalam perkembangan di negara-negara ASEAN. Sangaji menyarankan agar artikel wisata lebih banyak dimuat karena bisa menjadikan panduan jika ingin ke negara ASEAN. Ia Juga berharap majalah ini bisa disebar luaskan kepada masyarakat umum agar semua kalangan mengetahui kegiatan-kegiatan di ASEAN. •

NADYA AGUSTINE
SUMBER PENGETAHUAN ASEAN

Membaca Majalah Masyarakat ASEAN edisi 8 dan 9 sangat bagus untuk menambah pengetahuan di tentang perkembangan ASEAN. Banyak artikel yang menarik untuk dibaca. "Yang saya suka adalah artikel tentang kemajuan negara-negara ASEAN yang bisa memberikan gambaran sejauh mana suatu negara ASEAN berkembang," tutur Nadya Agustine, karyawati di salah satu perusahaan swasta di bilangan Sarinah Jakarta Pusat.

Menurutnya, artikel wisata di majalah ini memberikan inspirasi bagi pembaca untuk datang ke negara-negara ASEAN lain.

Selain itu, tampilan covernya menurut Nadya sangat menarik. Warnanya yang soft membuat orang tertarik ingin membacanya. Secara menyeluruh Majalah ASEAN ini sudah bagus semoga majalah ini bisa memberikan berita yang sedang berkembang di negara –negara ASEAN tentunya dengan berita yang akurat. ●

HERNAWAN
BERITA YANG INFORMATIF

"Tampilan dan cover Majalah Masyarakat ASEAN menarik, warnanya tidak menyolok serta bermakna. Selain itu, beragam artikel yang disuguhkan membuat orang tertarik untuk membacanya," kata Hernawan, seorang karyawan perusahaan tranding di Jakarta.

Ia berpendapat, sudah tepat jika majalah ini ditujukan untuk mensosialisasikan tentang Masyarakat ASEAN kepada masyarakat luas. Karena, majalah ini berisi banyak berita yang informatif, untuk masyarakat yang belum mengetahui tentang Masyarakat ASEAN.

Ia mengaku menyukai artikel ekonomi yang berhubungan dengan negara-negara ASEAN dan ekspor impor dari Indonesia ke negara-negara ASEAN. "Informasi tentang hal-hal apa saja yang mereka butuhkan dari Indonesia akan menjadi rujukan bagi para eksportir Indonesia," ujar Hernawan.

Ia berharap agar Majalah Masyarakat ASEAN ini bisa terus eksis dan memberikan informasi tentang kegiatan dan perkembangan negara–negara ASEAN yang sedang berlangsung .●

MEYDA
MENAMBAH PENGETAHUAN

Wanita ini mengaku baru pertama kali membaca Majalah yang berisi tentang ASEAN. "Sangat bagus untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi yang belum mengerti ASEAN," ucap Meyda, karyawati dari perusahaan yang bergerak di bidang bursa saham, di Jakarta Selatan.

Ia berpendapat, warna cover majalah ini bagus dan tidak mencolok, dengan gambar yang simple namun mempunyai arti.

Ia sendiri menyukai berita di rubrik laporan khusus dan wisata, karena berita-berita tersebut memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas. Contohnya, sidang–sidang ASEAN yang terus berkesinambungan, dan tempat wisata di negara–negara ASEAN yang menarik.

Ia menyarankan agar majalah ini bisa diberikan kepada masyarakat luas, dan selalu memberikan informasi terkini, baik berita politik maupun ekonomi. Apalagi, dalam ASEAN akan segera berintegrasi.●

DIDI
MEMPERKENALKAN MEA

Majalah Masyarakat ASEAN ini menarik untuk dibaca dan sangat tepat untuk menyambut datangnya MEA 2015 serta memperkenalkan Masyarakat ASEAN kepada masyarakat luas. Demikian pendapat Didi Karyawan BUMN di Jakarta Selatan .

Saat ini peran pemerintah dalam mensosialisasikan Masyarakat ASEAN masih kurang, terutama di daerah-daerah. Dalam rubrik laporan utama kesiapan daerah menyongsong MEA Jawa barat dan NTB sangat informatif tapi ia masih mempertanyakan bagaimana dengan kesiapan daerah lainnya?

Didi berharap Majalah ASEAN ini bisa memberikan gambaran tentang perkembangan ASEAN kepada masyarakat luas yang belum paham tentang ASEAN. •

MAYA FAUZIAH
MEMBUAT INGIN MEMBACA

Karyawati yang bekerja di , Jakarta Selatan ini menilai tampilan Majalah Masyarakat ASEAN menarik. "Warna nya bagus dan membuat orang ingin melihat dan membaca," tutur Maya Fauziah.

Berita yang disajikan juga banyak ragamnya baik poltik maupun ekonomi. Majalah ini memberikan wawasan tentang suatu negara ASEAN yang sedang berkembang dan menyongsong terbentuknya Masyarakat ASEAN.

Ia juga mengaku tidak begitu paham mengenai Masyarakat ASEAN. Namun, setelah membaca majalah ini, kini sedikit banyak dirinya sudah mengetahui bagaimana negara-negara ASEAN mempersiapkan datang nya MEA 2015.

Maya menyukai artikel laporan utama dan wawancara karena melalui rubrik tersebut ia dapat mengetahui bagaimana perkembangan UKM di daerah–daerah. Secara keseluruhan, menurutnya majalah ini sudah bagus dan bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai perkembangan ASEAN. •

DAVE
BERAGAM

Pria yang berprofesi sebagai *chef* di sebuah hotel berbintang di Jakarta Selatan ini menilai Majalah Masyarakat ASEAN sangat bagus. "Tampilan sampul depannya sederhana namun memberikan arti," ungkap Dave.

Menurut Dave, majalah ini memberikan informasi yang baik mengenai MEA 2015 yang akan datang. Artikelnya sangat beragam, mulai dari politik, ekonomi sosial budaya, dapat menambah pengetahuan tentang ASEAN.

Sebagai seorang *chef,* tentu saja ia menyukai artikel tentang kuliner dan wisata dari berbagai negara. Sayangnya, majalah ini tidak banyak memuat informasi tentang kuliner di rubrik wisatanya. Padahal, ada berbagai kuliner unik dari negara–negara ASEAN. "Saran saya untuk Majalah Masyarakat ASEAN, agar di setiap edisi dimuat artikel kuliner dari negara-negara," harap Dave. •

WINDA HERMINA
SELALU UP TO DATE

"Majalah yang bagus untuk dibaca, terlebih sebentar lagi kita memasuki MEA. Majalah ini patut diacungi dua jempol," ujar Winda Hermina, mahasiswi di Jakarta.

Menurutnya, majalah ini adalah bacaan yang tepat untuk memahami bagaimana kesiapan wilayah-wilayah di negara kita dalam menghadapi MEA. Dan, dengan disuguhkannya berita-berita yang menarik, pembaca juga bisa mengetahui berita-berita tentang ASEAN yang selalu up to date.

Winda menilai cover majalah ini nyaman untuk dilihat, dan gambarnya mampu menggelitik pembaca untuk berpikir seperti apa isi di dalamnya. Yang ia suka dari majalah ini adalah artikel wisatanya. "Rubrik wista ini membuat saya jadi banyak tahu wisata apa saja dan yang menarik, apabila suatu saat saya pergi ke sana," kata Winda.

Ia juga berharap majalah ini disebarluaskan pada khalayak umum, agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui MEA, dan sesegera mungkin menyiapkan diri untuk bersaing dalam MEA. •

HAMONANGAN BATUBARA
MEMBERI BANYAK INFORMASI

Majalah Masyarakat ASEAN membuka wawasan yang lebih dalam tentang perkembangan yang tengah berlangsung di dalam ASEAN. Karenanya, pria ini sangat mengapresiasi majalah ini. "Secara umum majalah ini memberi banyak informasi tentang Masyarakat ASEAN," tutur Hamonangan Batubara, karyawan salah satu BUMN yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Terkait tampilan desain, pria ini menganggap sudah cukup bagus. Covernya bagus, tidak banyak ornamen tapi

mengandung arti yang cukup jelas dan nyaman dipandang mata.

Ia juga mengaku menyukai berita-berita yang ada di rubrik laporan utama dan laporan khusus. Karena, membuatnya bisa mengetahui perkembangan ekonomi maupun politik negara-negara di ASEAN. Menurutnya, berita tentang sidang-sidang maupun perjanjian di ASEAN hendaknya selalu dimuat agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. •

NOVA
BAGUS UNTUK SOSIALISASI

Mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Bandung ini berpendapat bahwa Majalah ASEAN ini bagus untuk sosialisasi mengenai ASEAN kepada khalayak luas. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih banyak tahu tentang perkembangan ASEAN.

Nova menambahkan, cover Majalah ASEAN ini bagus dan simple. Sementara isi artikelnya, yang ia sukai adalah rubrik wisata. Karena, isinya menambah

wawasan untuk lebih mengenal obyek wisata bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, khususnya ASEAN.

"Semoga Majalah Masyarakat ASEAN ini bisa bermafaat bagi banyak orang, terutama untuk menambah pengetahuan mereka mengenai ASEAN," pungkas Nova. •

SARIFAH HANA
BERGUNA BAGI MASYARAKAT AWAM

Sarifah menilai Majalah Masyarakat ASEAN sangat berguna khususnya bagi masyarakat awam yang ingin mengenal ASEAN. "informasinya yang up to date tentang pengenalan industri, perdagangan yang berpotensi bagi Indonesia, akan membuka pikiran pembaca sehingga bisa siap menghadapi MEA," tutur Sarifah Hana, mahasiswi di salah satu universitas di Makassar.

Menurutnya, cover majalah ini cukup bagus, lay out nya berciri khas, warnanya menarik perhatian dan minat pembaca. Yang dia sukai dari majalah ini adalah informasi dengan data-data lengkap, serta tanggapan yang optimis akan MEA. Selain itu, gambar dari artikel yang diterbitkan sangat bagus dan memberikan gambaran yang menarik.

Saran saya majalah ini disebarkan ke masyarakat luas, atau disediakan di fasilitas publik yang sering dikunjungi masyarakat, serta di sekolah-sekolah. Sehingga, masyarakat serta para pelajar dapat memiliki wawasan yang luas tentang ASEAN. •

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, mengucapkan

SELAMAT ATAS DIMULAINYA PEMBERLAKUAN MASYARAKAT ASEAN

31 Desember 2015